

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGARUH OPINI PUBLIK TERHADAP PROSES PENGAMBILAN
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: STUDI KASUS PROYEK KERETA
CEPAT JAKARTA-BANDUNG (2008-2015)



FARID RAMADHONY, S.Sos., LLM
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta

2021

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

Judul Penelitian : **Pengaruh Opini Publik Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung**

Peneliti

a. Nama Lengkap : Farid Ramadhony, S.Sos. LLM
b. NIDN : 0326039203
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
e. Program Studi : Hubungan Internasional
f. Nomor HP : 087838220092
g. Alamat Email : faridramadhony@dsn.moestopo.ac.id

Asisten Peneliti (Mahasiswa; Jika Ada)

a. Nama Lengkap :
b. Fakultas :

Jakarta, Juni 2021

Mengetahui,
KAPUSLITDIANMAS



Yaset Firmansyah, M.Si

PENELITI



Farid Ramadhony, S.Sos, LLM

Menyetujui,
DEKAN



Prof. Dr. Himsar Silaban, MM

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
Abstrak	vii
Bab I Pendahuluan	1
- Latar Belakang Masalah	1
- Latar Belakang Penelitian	2
- Manfaat Penelitian	3
- Politik Domestik dan Opini Publik di Indonesia	3
- Bangkitnya Demokrasi di Indonesia	5
- Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Opini Publik di Indonesia	7
- Implikasi	11
Bab II Tinjauan Pustaka	13
- Faktor Ekonomi Politik Internasional	13
- Faktor Politik Domestik	16
Bab III Metode Penelitian	19
- Kerangka Pemikiran	20
- Definisi Konseptual	21
- Hipotesis	26
- Model Analisis	26
Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian	27
- Inisiasi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung	27
- Pola Masyarakat pada Pemilu 2009	27
- Politik dalam negeri Internasional dan Kebijakan SBY “ <i>Million Friends Zero Enemy</i> ”	28
- Jalan Menuju Pemilu Presiden dan Pemilihan Umum 2014 SBY dan Legislatif	30
- Media yang dijalankan oleh kelompok Elite	31
- Pelaksanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Periode Jokowi (2014-2015)	33
- Pola masyarakat pada Pemilu 2014	33
- Politik dalam negeri Isolasionis dan kebijakan Jokowi Nawacita	35
- Jalan menuju Pemilu Presiden dan Pemilu 2019 Jokowi dan Legislatif	36
- Afiliasi Media dengan Kelompok Elite	38
Bab V Kesimpulan	41

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Gambaran Media Tradisional di Indonesia	10
Tabel 2.1. Rangkuman Tinjauan Pustaka	17
Tabel 4.1. Data Rekapitulasi Pemilu 2009	28
Tabel 4.2. Komposisi Kabinet SBY 2009	30
Tabel 4.3 Korelasi Antara Media dan Kelompok Elit	31
Tabel 4.4 Data Rekapitulasi Hasil Pemilu 2014	34
Tabel 4.5. Visi Misi Jokowi pada Pilpres 2014	35
Tabel 4.6. Komposisi Kabinet Jokowi 2014	37
Tabel 4.7. Korelasi antara Media Elite dan Parpol	38
Tabel 4.8. Pencitraan media dalam berita berkaitan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung	39

Daftar Gambar

Gambar 3.1. Pluralist Model	23
Gambar 3.2. Elite Model	23
Gambar 3.3. Isolationist & Internationalist Model In Society	24
Gambar 3.4. Agenda Setting, Priming, Framing Model In Media	25
Gambar 3.5. Model Analisis	26
Gambar 5.1. Perubahan Ideologi Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri	41
Gambar 5.2. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Diikuti Oleh Ideologi yang Isolasionis	42

Daftar Lampiran

Tautan Video Youtube

Metro TV:

1. https://www.youtube.com/watch?v=u2o6fYvh_ko
2. <https://www.youtube.com/watch?v=gHX2GZDGraA>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=eie33cPINns>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=eie33cPINns>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=eie33cPINns>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=xLAEkiiwuMo>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=Q9B8IigabLo>
8. <https://www.youtube.com/watch?v=LTxKanyg-fU>
9. <https://www.youtube.com/watch?v=3KqpvSqCZ0E>
10. <https://www.youtube.com/watch?v=5SNpwEEZ4gc>
11. <https://www.youtube.com/watch?v=VUMdu5TYdQo>

TV One:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=IVi7VBkxGlk>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=t9MxiXfT7K0>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=-wPFPSldQes>

Inews:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=EQx6DpkviYA>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=WzeqyJYeFZo>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=UGmNkzBNbEU>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=LoorNtIsKV4>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=mmnPmpgKVEw>

CNN Indonesia:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=2A9Lt0jotk>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=aR0rfu4KZGM>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=u6XuQc6HQbs>

Abstrak

Penelitian ini akan berfokus pada topik pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia sekaligus menjawab pertanyaan penelitian tentang sejauh mana pengaruh opini publik terhadap proses pengambilan kebijakan luar negeri di Indonesia melalui studi kasus proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang berakibat pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam memilih Tiongkok sebagai mitra proyek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa opini publik berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, dalam kasus Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Masyarakat dan media saling berhubungan akibatnya mempengaruhi pemerintah, dan proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari sudut pandang Indonesia terhadap hasil kebijakan luar negerinya untuk bekerja sama dengan Tiongkok untuk proyek infrastruktur dan strategis yang signifikan. Alasan utama untuk menggunakan sudut pandang Indonesia dalam penelitian ini adalah karena terbatasnya penelitian yang menganalisis hasil politik luar negeri Indonesia dari lingkungan politik dalam negeri terutama pengaruh opini publik dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Dalam menganalisis masalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis penelitian dilakukan dengan pengumpulan data dengan studi kasus yang dipelajari. Bentuk datanya umumnya berupa dokumen ilmiah dan literatur untuk menunjang penelitian. Bahan dan dokumentasi mengambil jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui buku teks dan sumber internet. Selain itu, penelitian ini menerapkan teori opini publik untuk memahami proses dan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

Kata kunci: Politik Domestik Indonesia, Opini Publik, Kebijakan Luar Negeri, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada analisa tentang proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia, sekaligus menjawab pertanyaan penelitian tentang sejauh mana opini publik berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan luar negeri di Indonesia. contoh kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang kemudian menghasilkan kebijakan luar negeri untuk memominasikan Tiongkok sebagai mitra proyek.

Inisiasi proyek kereta cepat pertama di Indonesia dimulai pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada tahun 2008. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ditunjuk untuk merancang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk melakukan studi kelayakan.

Selanjutnya perkembangan proyek kereta cepat di Indonesia terjadi pada tahun 2014. Menyusul kemenangan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia untuk periode 2014-2019, Presiden Jokowi memiliki sembilan prioritas pembangunan yang disebut dengan istilah *nawacita*. Salah satu prioritas pembangunan dalam *nawacita* adalah meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing internasional. Dalam rangka mewujudkan prioritas tersebut, Presiden Jokowi mempertimbangkan gagasan untuk meneruskan rencana pembangunan kereta api kecepatan tinggi yang menghubungkan Jakarta-Surabaya, dimana sebagai langkah awal yang diambil adalah skema pembangunan rel kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, yang mana opsi tersebut dianggap yang paling mungkin dilakukan pada saat itu.

Melihat situasi dan perkembangan yang ada Jepang kembali tertarik untuk terlibat dalam proyek tersebut, karena sebelumnya JICA telah lebih dulu melakukan studi kelayakan (bersama Bappenas dan Kemenhub). Jepang dengan teknologi kereta cepat *Shinkansen* yang telah dikembangkan sejak tahun 1960, merasa percaya diri untuk maju dalam proses lelang pengadaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun

faktanya, separuh dari jalur kereta api cepat dunia dibangun di Tiongkok dalam satu dekade terakhir, yang membawa Tiongkok sebagai salah satu pemain penting dalam teknologi kereta api cepat di dunia. Setelah melalui proses lelang akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memilih rekanan dari Tiongkok sebagai mitra pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pendekatan Tiongkok untuk meyakinkan Pemerintah Indonesia dimulai Ketika Presiden Jokowi memulai lawatan resmi luar negeri pertamanya ke Tiongkok pada November 2014, kurang dari sebulan setelah ia menjabat untuk menghadiri KTT APEC Ke-26 yang diadakan di Beijing. Menyusul momentum tersebut di tahun 2015, kedua negara sepakat untuk menjalin kerja sama di bidang energi dan infrastruktur mulai Januari 2015. Pemerintah Indonesia memilih rekanan Tiongkok untuk Optimalisasi Aset Pembangkit Listrik Tenaga Batubara - Fast Track Program 1, kemudian pada Maret 2015 kembali Pemerintah Indonesia memilih mitra Tiongkok untuk melaksanakan satu proyek infrastruktur vital yaitu Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dimana pada kesempatan yang sama kedua belah pihak telah menandatangani nota kesepahaman tentang infrastruktur dan kerja sama industri. Berdasarkan nota kesepahaman tentang infrastruktur dan kerja sama industri antara Indonesia dan Tiongkok, terdapat empat kerja sama infrastruktur vital yang disepakati kedua belah pihak untuk bekerja sama, yaitu: *Railway* (kereta kecepatan tinggi); jalan/jalan tol/jalan raya; pelabuhan/terminal penyeberangan; dan bandara.

Latar Belakang Penelitian

Penelitian mengenai hubungan Indonesia dan Tiongkok banyak difokuskan melalui sudut pandang hubungan kedua negara dalam bidang ekonomi serta posisi Indonesia di Asia Tenggara dalam kerangka ASEAN, seperti kepentingan Tiongkok di Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (selanjutnya ACFTA). Selanjutnya penelitian yang berfokus pada opini publik terhadap pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia masih terbatas. Penelitian ini akan menjelaskan sejauh mana opini publik di Indonesia berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, yang selanjutnya menghasilkan produk kebijakan luar negeri, dengan menggunakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai studi kasus.

Manfaat Penelitian

- 1 Penelitian ini merupakan salah satu bentuk pengamalan dari konsep Tridharma Perguruan Tinggi yaitu partisipasi keilmuan yang direalisasikan dalam bentuk penelitian;
- 2 Dapat memberikan rekomendasi bagi penulisan akademik, di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPDM(B);
- 3 Dapat memberikan rekomendasi penelitian bagi masyarakat umum;
- 4 Diharapkan dapat memberikan sumbangsih khususnya bagi perkembangan dan kemajuan program studi ilmu Hubungan Internasional FISIP UPDM (B)

Politik Domestik dan Opini Publik di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi demokrasi ke dalam sistem politik nasional, meskipun prinsip demokrasi baru dipraktikkan selama 20 tahun terakhir setelah rezim Suharto runtuh pada tahun 1998. Terbukti bahwa tahun 1998 merupakan tahun transisi system politik di Indonesia, dari rezim semi-otoriter di Soeharto "Orde Baru" menuju "Reformasi" setelahnya. Akibatnya, peran opini publik menjadi lebih kritis sebagai pertimbangan pemerintah sebelum mengambil keputusan kebijakan. Bab ini memperkenalkan latar belakang singkat demokrasi Indonesia setelah masa orde baru. Juga menunjukkan peran masyarakat dalam mempengaruhi opini publik.

Proses transisi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi di Indonesia tidak terjadi begitu saja, namun banyak faktor yang memicunya. Setidaknya ada empat faktor yang dapat dipetakan untuk memahami proses transisi politik di Indonesia.

Pertama, krisis material (ekonomi) yang dipicu oleh krisis ekonomi regional. Krisis ekonomi di berbagai negara, terutama di Asia, seperti Thailand, Filipina, Korea Selatan, dan Malaysia dan kemudian singgah di Indonesia, menghancurkan harapan dan optimisme perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Kemerosotan ekonomi ini melemahkan semangat kekuasaan Soeharto, karena basis dukungan ekonomi yang dipenuhi korupsi, kolusi, dan nepotisme membuka celah munculnya semangat masyarakat sipil melawan kekuasaan Soeharto dan seluruh basis pendukungnya.

Menrespon krisis ekonomi ini, Soeharto kehilangan sumber legalitas dan legitimasi kekuasaannya. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sangat parah karena tata cara pengelolaan ekonomi yang dipimpin oleh Soeharto cenderung ambivalen. Hal tersebut diperparah dengan patrimonialisme sistematis, di mana Soeharto sendiri menjadi pusat kendali segalanya, bagi keluarga, kerabat, teman, dan kelompok loyalis di Partai Golkar, Birokrasi, dan Militer dengan pendekatan teknokratis dalam merancang sistem ekonomi. Sementara itu, para teknokrat yang berada di dalam dapur ekonomi Indonesia tidak mampu menerapkan resep ekonominya, karena mereka dibingungkan oleh Soeharto yang memiliki kekuatan untuk menjalankan apa yang benar dalam pikirannya. Strategi ekonomi ambivalen inilah yang menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan dengan korupsi yang merajalela dan eskalasinya menghasilkan kejatuhan rezim orde baru dan gerakan menuju demokrasi.

Kedua, krisis legitimasi kekuasaan Soeharto, di mana saat Soeharto berkuasa, ia memiliki kecenderungan dalam mendukung legitimasi insentif material mulai dari pangkat, gelar, kelas, dan properti bagi para pengikutnya, oleh karena itu ia mengalami masalah legitimasi kronis. Legitimasi Soeharto adalah campuran antara legitimasi karismatik dan legal-rasional.

Ketiga, kuatnya tuntutan masyarakat sipil yang ingin menggulingkan atau mengakhiri rezim Suharto dengan mengadopsi konsep "Suksesi Kepemimpinan Nasional". Munculnya arus masuk massa yang masif, ketika demonstrasi mahasiswa yang berjumlah kurang lebih 15.000 orang berhasil menduduki gedung DPR / MPR yang menyebabkan kelumpuhan politik nasional. Misi utama dari gerakan reformasi adalah suksesi kepemimpinan nasional, khususnya kepemimpinan Presiden Soeharto yang telah berlangsung selama 32 tahun. Publik menentang Soeharto karena ketidakpuasan terhadap kinerja Soeharto dan mesin pendukungnya, meluasnya ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Soeharto dengan mesin kekuasaannya.

Keempat, Soeharto mengalami keruntuhan akibat a) terjadinya pengkhianatan dan kepanikan di kalangan elite pendukung Soeharto dan hancurnya mesin pendukung Soeharto akibat derasnya arus tekanan demonstran; b) militer, birokrasi, Partai Golkar dan para teknokrat Suharto, disalahgunakan sebagai alat silat Suharto yang bekerja tidak kompeten; c) Soeharto tidak mampu mengendalikan mesin

politiknya, terutama militer, birokrasi, dan Partai Golkar yang mengalami konflik internal yang sangat wajar sebagai akibat preferensi terhadap kelangsungan hidup Soeharto atau berpihak pada para reformis, dan; d) pada saat yang sama juga muncul tokoh-tokoh oportunistik yang semula berpihak pada Soeharto, kemudian beralih mencaci Soeharto sehingga membuat Soeharto kehilangan kesabarannya untuk turun dari panggung kekuasaannya.

Akibat tekanan yang sangat besar dari dalam negeri dan internasional, pada 21 Mei 1999, melalui siaran TV Nasional, Soeharto menyatakan pengunduran diri sebagai presiden dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Habibie untuk dilantik sebagai Presiden, di hadapan Mahkamah Agung. Penyerahan kekuasaan menandai detik-detik peralihan kekuasaan di Indonesia, setelah 32 tahun rezim Suharto berkuasa (T.R, 2016).

Meski masih banyak yang meragukan legalitas dan legitimasi proses peralihan kekuasaan dari Soeharto ke BJ Habibie, namun secara prosedural berdasarkan konstitusi UUD 1945 yang disahkan saat itu-maka proses peralihan kekuasaan pada saat itu dapat berjalan dan dinyatakan sah serta diakui Prof. Dr. Ir. Eng. BJ. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia.

Bangkitnya Demokrasi di Indonesia

Pasca penggulingan masa Orde Baru (Soeharto) dilakukan atas desakan mahasiswa yang lebih dikenal dengan era reformasi. Di era reformasi ini, Indonesia berupaya meregenerasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial dan politik. Setelah itu, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperkuat demokrasi dalam sistemnya. Setelah pemilihan presiden tahun 2004 dimana pertama kali dalam sejarah Indonesia masyarakat memilih presidennya secara langsung. Pemilu dikatakan sebagai pemerintahan rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Dalam sepuluh tahun pemerintahan demokratis pasca reformasi, penyelenggaraan negara dibuat setransparan mungkin sehingga publik dapat memantau kinerja pemerintahan terpilih.

Proses menjalankan demokrasi saat ini merupakan proses kemandirian masyarakat dalam menjalankan negara demokrasi. Tak pelak demokrasi membawa perubahan dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Masyarakat dapat

menjunjung tinggi nilai kebhinekaan, nilai kebebasan berekspresi juga memiliki ruang yang lebih sesuai, dan nilai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan ikut mengawasi pemerintahan. Nilai-nilai kebebasan tersebut dijunjung tinggi setelah era reformasi ini.

Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara demokrasi merupakan suatu sistem yang dijunjung tinggi dan diberi tempat yang layak dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai demokrasi, namun dalam sistem politik demokrasi di Indonesia saat ini terkadang masih menantang untuk menerapkan demokrasi secara penuh. Kendala yang dihadapi merupakan kendala yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.

Dalam sistem politik Indonesia, masa reformasi juga memberikan perubahan yang sangat besar. Pemerintah lebih transparan dan akuntabel kepada rakyat karena pemerintah adalah amanah rakyat dan oleh karena itu masyarakat menjadi pengawas bagi pemerintah. Kritik yang menimbulkan opini publik menjadi saran dan masukan bagi pemerintahan berdaulat saat ini. Sedangkan pada masa Orde Baru, masyarakat masyarakat sulit untuk menyuarakan haknya, apalagi untuk mengontrol pemerintah. Pasalnya, pemerintah pada masa Orde Baru tidak memberikan ruang publik yang berarti bagi masyarakat dalam ikut berpolitik. Pemerintahan menjadi sangat dominan dan tidak terkendali, penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administrasi juga terjadi.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi, dan landasan ketatanegaraan Indonesia menjadi UUD 1945 hasil amandemen. Di era reformasi telah banyak terjadi perubahan, khususnya dalam ranah demokrasi. Jatuhnya Soeharto menjadi titik balik bagi partai kecil dan organisasi lain untuk berkiprah dalam politik. Indonesia kembali ke sistem multi partai, dan pada Pemilu 1999 jumlah partisipan partai mencapai 48 partai dengan 21 partai masuk DPR. 21 partai di DPR adalah partai yang berhasil melewati persyaratan electoral threshold. PDIP memenangkan pemilu 1999. Kemudian pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang menjadi 24 partai dengan tujuh partai di DPR yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Menurunnya jumlah partai peserta pemilu ini disebabkan semakin ketatnya persyaratan yang diterapkan melalui 2 tahapan seleksi. Pertama, seleksi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan tahap kedua,

seleksi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai Golkar memenangkan pemilu 2004. (Budiarjo, 2010)

Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Opini Publik di Indonesia

Di negara demokratis, pemilu adalah alat utama untuk mengesahkan mandat masyarakat kepada pemerintah; parlemen mewakili masyarakat untuk membuat kebijakan pemerintah menjadi undang-undang. Sementara eksekutif memberlakukan hukum. Sebagai negara demokratis, data hasil pemilu dapat mencerminkan karakteristik dan pola masyarakat dan opini publik. Apalagi data dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh publik. Akibatnya, data pemilu dapat digunakan sebagai alat penelitian.

Sejak Pemilu langsung pertama secara nasional pada tahun 2004, ada beberapa partai besar yang memiliki pengaruh kuat di pemerintahan. Secara umum spektrum lingkungan politik dapat dibagi menurut ideologi politik yaitu Islamis atau Nasionalis. Alternatifnya, berdasarkan ideologi politik yaitu Liberalis, Sosialis, atau Konservatif. Sejak pemilu nasional 2009, KPU menggunakan persentase suara elektoral 2,5% untuk partai mana pun yang berhak mendapatkan kursi parlemen. Mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Umum 2009 Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten / Kota. Dalam pasal I ayat 27 disebutkan:

“Jumlah suara Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah jumlah yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh parpol peserta pemilu dikurangi jumlah suara parpol yang tidak memenuhi 2,5% (dua koma lima persen) suara sah nasional dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah kursi dari partai politik peserta pemilu dan pemilihan anggota DPR ”.

Menyusul pada Pemilu 2014, UU Pemilu 2014 diperbarui DPRD dari 2,5% pada 2009 menjadi 3,5% pada Pemilu 2014. Hal itu disebutkan dalam pasal 208 undang-undang nomor 8 2012 tentang pemilihan umum 2014 anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan daerah. pasal tersebut menyatakan:

Partai Politik Peserta harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah nasional untuk

dimasukkan dalam penetapan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Provinsi, dan DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten / Kota. ”

1. Peran media dalam pembentukan opini publik di Indonesia

Di Indonesia media dibedakan oleh media tradisional, seperti Televisi, Koran, Tabloid, dan Jurnal. Kedua, new media yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah pengguna internet yang tinggi di Indonesia. Lahirnya media baru merupakan tonggak sejarah opini publik di Indonesia. Sebab, berbeda dengan media tradisional, media baru lebih khusus media sosial yang menggunakan interaksi langsung antar penggunanya. Apalagi media tradisional lainnya yaitu surat kabar dan televisi telah bertransformasi ke format digital barunya. Selanjutnya memberikan lebih banyak pilihan variasi untuk dipilih oleh publik.

a. New Media

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia. Pengguna Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya dari Indonesia menempati porsi yang signifikan dari total pengguna media sosial. Media sosial di Indonesia mulai pesat mengikuti perkembangan akses internet pengguna di Indonesia terutama dengan berkembangnya infrastruktur internet di Indonesia seperti akses wifi, jaringan fiber dan lain sebagainya.

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, sekitar 143 juta penduduk Indonesia terkoneksi internet atau 54,68 persen dari 262 juta penduduk negara. Metodologi yang digunakan adalah Multi-Stage Cluster Sampling dengan jumlah responden 2.500. Margin of error adalah 1,96 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen. Salah satu argumen paling penting, mengapa hal itu bisa terjadi, adalah karena perangkat internet seluler lebih terjangkau bagi masyarakat untuk memungkinkan penetrasi jaringan yang lebih tinggi.

Mulai saat ini menurut survei APJII mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41 persen masih berasal dari masyarakat perkotaan. Pemanfaatannya lebih jauh, tidak hanya untuk berkomunikasi tetapi juga untuk membeli barang, memesan transportasi, untuk berbisnis dan bekerja. Sebanyak 49,52 persen pengguna internet di Indonesia adalah mereka yang berusia 19 hingga 34 tahun. Di posisi kedua, sebanyak 29,55 persen pengguna internet Indonesia berusia 35 hingga 54 tahun. Kelompok ini berada pada usia produktif dan mudah beradaptasi terhadap

perubahan. Remaja usia 13 hingga 18 tahun menempati posisi ketiga dengan porsi 16,68 persen. Terakhir, lansia di atas 54 tahun hanya 4,24 persen yang menggunakan internet. (Bohang, 2018)

Faktor pendidikan juga mempengaruhi penetrasi internet di Indonesia. Sebanyak 88,24 dari mereka memegang Master dan Ph.D. terhubung dengan internet. Mayoritas lulusan sarjana dan diploma juga telah menggunakan internet yaitu 79,23 persen. Di beberapa universitas dan perguruan tinggi kejuruan, Internet memang telah menjadi bagian penting dari proses belajar mengajar. Bagi mereka yang berpendidikan SLTA, SLTP, SD, dan Non Sekolah, persentase pengguna internet masing-masing adalah 70,54 persen, 48,53 persen, 25,10 persen, dan 5,45 persen. (Bohang, 2018)

Dari tingkat ekonomi juga bisa dibedakan, dimana mayoritas pengguna internet berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dari 143 juta penduduk Indonesia yang sudah terkoneksi internet, ada sekitar 62,5 juta masyarakat kelas menengah ke bawah yang menggunakan internet. Sedangkan kelas atas 2,8 juta orang. (Bohang, 2018)

Saat ini media sosial tidak hanya digunakan sebagai platform komunikasi dan sosialisasi, tetapi juga digunakan untuk kepentingan politik, pemerintahan, dan lainnya seperti kasus Pilpres 2014, sebagian besar kampanye masif dilakukan melalui internet dan media sosial. Konstruksi realitas sosial dari informasi atau peristiwa tertentu sangat mudah dilakukan dengan media sosial.

Masyarakat Indonesia semakin aktif di dunia sosial media, dengan tingkat penetrasi yang mencapai ratusan juta orang, sehingga konten apapun dapat menjadi viral dengan mudah seperti kejadian unik hingga hal-hal kecil yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya viral. Petisi online juga semakin marak. Menunjukkan bahwa pengguna media sosial tidak hanya menyadari fungsi media sosial untuk berinteraksi, tetapi juga untuk melakukan gerakan atau mendukung ide-ide tertentu. Sehingga mereka bisa berkontribusi untuk mengatur perkembangan masyarakat sekitar, seperti permohonan penghentian siaran televisi yang tidak mendidik, pembubaran gerakan massa tertentu dan lain sebagainya.

b. Media Tradisional

Keterlibatan media dalam aktivitas politik menjadi ciri politik domestik di Indonesia. Media dalam hal ini didefinisikan secara luas, yaitu segala sarana yang terkait dengan penyampaian pesan, baik yang nyata maupun simbolis, dari lembaga politik kepada publik. Media dalam hal ini bisa berupa TV, radio, majalah, dan surat kabar. Penggunaan media massa sebagai instrumen untuk mengkomunikasikan ide, pesan, dan program kerja politik dikarenakan media dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik dengan biaya yang relatif murah.

Dengan kemampuannya menjangkau massa yang luas, informasi dari media massa dapat menembus jumlah penduduk yang besar pula. Ketika kekuatan politik ingin mendiskreditkan citra politik lawan, yang perlu dilakukan adalah hanya membanjiri informasi di media massa dengan hal-hal buruk yang dilakukan lawan politik. Apalagi sebaliknya, bila ingin membentuk citra positif masyarakat, cukup dengan membanjiri media massa dengan hal-hal positif dari sebuah partai atau calon.

Mudahkah mengidentifikasi afiliasi media tradisional dengan politik domestik selain juga opini publik, dibandingkan dengan media baru yang cenderung lebih dikenal secara internasional. Klasifikasi yang menggunakan indikator adalah faktor independen media, afiliasi dengan partai politik atau kelompok elit. Juga platform media itu sendiri.

Tabel 1.1. Gambaran Media Tradisional di Indonesia

MEDIA NAME	PLATF ORM	AFFILIATION	CONCEPT APPLICATION
KOMPAS	Daily Newspaper, News Channel	Independent	Pluralist
REPUBLIKA	Daily Newspaper	Independent	Pluralist
SINAR HARAPAN	Daily Newspaper	Independent	Pluralist
SUARA PEMBARUAN	Daily Newspaper	Independent	Pluralist

MNC GROUP	Daily Newspaper, 24 Hours TV News Channel	Harry Tanoesoedibjo, a billionaire businessman, and politician, Chinese Indonesian Elite.	Neither of It
MEDIA INDONESIA GROUP	Daily Newspaper, 24 Hours news Channel	Surya Paloh former Golkar official, which now establish <i>NasDem Party</i> , pribumi elite	Pro-Elite
BAKRIE GROUP, UNDER ITS SUBSIDIARY VIVA GROUP	24 Hours news Channel	Aburizal Bakrie, Politician, Chairman <i>Golkar party</i> , pribumi elite	Pro-Elite
CT GROUP	24 Hours News Channel	Chairul Tanjung, Technocrat, former Coordinating Minister for Economics during SBY period in 2014, pribumi elite	Neither of It
TVRI	News Channel	Government-owned	Pro-Elite

Dari klasifikasi data media tradisional utama Indonesia, empat surat kabar harian termasuk kategori independen dan pluralis, sedangkan dua surat kabar harian (Hairan Sindo dan Media Indonesia) memiliki afiliasi politik / elit. Dari keempat saluran berita utama 24 jam (INews, Metro TV, TV One, CNN Indonesia), di mana televisi berbagi jumlah pemirsa yang signifikan dibandingkan dengan surat kabar, tidak satupun dari mereka yang independen. Hanya Kompas TV dari Kompas Group yang tetap independen, setelah itu TVRI menjadi satu-satunya saluran berita milik pemerintah yang juga jelas non-independen. Semua media tersebut Pro-Elite kecuali empat surat kabar harian yang disebutkan di atas.

Implikasi

Menurut survei Nilsen yang dilakukan pada 2014. Secara keseluruhan, konsumsi media di kota-kota. Baik di Jawa maupun Luar Jawa, terlihat bahwa televisi masih menjadi media utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia (95%), diikuti oleh

Internet (33%), Radio (20%), surat kabar (12%), Tabloid (6%) dan Majalah (5%). Namun jika dilihat lebih jauh, terdapat perbedaan yang menarik antara pola konsumsi media di kota-kota di Jawa jika dibandingkan dengan kota-kota di luar Jawa. Konsumsi media televisi lebih tinggi di luar Jawa (97%), diikuti oleh Radio (37%), Internet (32%), Koran (26%), Bioskop (11%), Tabloid (9%) dan Majalah (5%). (Nilsen Indonesia, 2014)

Untuk menyimpulkan bagian ini, media di Indonesia dibagi menjadi dua kategori, media baru dan media tradisional. Pengambilan media baru di media sosial seperti facebook, twitter, dan Instagram, banyak digunakan di kalangan masyarakat Indonesia. Lebih dari setengah warga negara terhubung ke internet menurut survei saat ini, sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan opini publik dalam kategori ini secara mandiri tanpa banyak campur tangan pemerintah atau elit. Sehingga pada kategori new media khususnya pada social media platform sulit untuk mengoperasikan Agenda Setting, Priming, maupun Framing (walaupun juga bukan tidak mungkin) karena new media cenderung pluralis dan bekerja secara diam-diam berbeda dibandingkan dengan media tradisional. Tingkat pendidikan dan rentang usia juga memainkan faktor penting. Orang-orang dalam kisaran ini terutama terpapar berita internasional, dan tren global, sehingga mereka menyukai internasionalis.

BAB II

Tinjauan Pustaka

Ada dua pendekatan utama dalam riset mengenai Hubungan Indonesia-Tiongkok yaitu Faktor Ekonomi Politik Internasional dan Faktor Politik Domestik. Sebagian besar peneliti berpendapat bahwa Hubungan Indonesia-Tiongkok mencakup aspek kepentingan ekonomi, sumber daya alam (energi), permintaan pasar, dan Perjanjian Perdagangan Bebas dalam kerangka ACFTA. Argumen mereka terutama terbatas pada kasus hubungan Indonesia-Tiongkok melalui kerangka hubungan Tiongkok-ASEAN dengan pendekatan yang umum. Di sisi lain, ada juga beberapa peneliti yang berpendapat bahwa politik dalam negeri dan pendekatan kepemimpinan merupakan hal yang sangat krusial dalam hubungan Indonesia-Tiongkok, terutama keputusan pemimpin negara terhadap suatu peristiwa yang krusial. Namun demikian, hanya sedikit penelitian yang memfokuskan pada pengaruh opini publik dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia. Akibatnya, penelitian tentang hubungan Indonesia-Tiongkok dengan menggunakan sudut pandang Indonesia, lebih spesifiknya menggunakan opini publik sebagai instrumen analisis masih belum memadai.

Faktor Ekonomi Politik Internasional

Argumen pertama adalah pendekatan kepentingan ekonomi, para ahli tentang pendekatan ini menggambarkan pandangan politik, ekonomi internasional. Pertumbuhan Tiongkok memunculkan kecenderungan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Hal tersebut diikuti dengan keinginan untuk menjual produknya ke pasar besar seperti Indonesia. Ada juga defisit energi dan bahan baku di Tiongkok, yang berakibat pada impor permintaan energi dan bahan baku dari negara lain, dalam hal ini Indonesia.

Tinjauan pustaka **pertama** adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Wu Changbo pada tahun 2011 dengan judul: "Forging Closer Sino-Indonesian Economic Relations and Policy Suggestions", *Ritsumeikan International Affairs*. Wu berpendapat bahwa setidaknya ada empat faktor yang meningkatkan hubungan kedua negara. Pertama, adalah perdagangan dan investasi dan Pemerintah Cina secara aktif telah

mempromosikan strategi “keluar”, dan mendorong perusahaan untuk go internasional. Terutama berinvestasi di negara-negara ASEAN termasuk Indonesia; kedua, Cina perlu mengamankan konsumsi energi dan bahan bakunya dari sumber luar. China memiliki permintaan besar untuk konsumsi minyak, menurut perkiraan Administrasi Informasi Energi AS bahwa permintaan minyak China akan meningkat 130%, mencapai 12,8 juta barel per hari pada tahun 2025, dan kenyataan itu akan memaksa China untuk menemukan sumber baru untuk mengisi kesenjangan konsumsi mereka. Indonesia memiliki produksi minyak 9 miliar barel dalam cadangan minyak, serta 9,3 miliar ton batu bara, dan 188 triliun kaki kubik gas. Ketiga, posisi Indonesia sebagai negara dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan 260 juta Penduduk Indonesia juga pasar yang besar, China, Jepang, dan AS ingin memperkuat pengaruhnya di Indonesia. Keempat, Indonesia menyambut baik investasi dari China, terutama aliran modal manufaktur yang masuk ke Indonesia. (Changbo, 2011)

Tinjauan pustaka yang **kedua** adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Anne Booth pada tahun 2011 dengan judul: “China’s Economic Relations with Indonesia: Threats and Opportunity”, SOAS University of London. Anne Booth berpendapat bahwa perlambatan dan pemulihan ekonomi di Indonesia memengaruhi hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok. Pada periode terakhir rezim Suharto pasca krisis finansial 1997. Pasca transisi politik 1998, perekonomian Indonesia mulai pulih, dan hubungan ekonomi dengan Tiongkok semakin stabil. Pertumbuhan pesat juga terjadi karena ACFTA, akan tetapi perhatian publik Indonesia saat itu terfokus pada komoditas pertanian dan manufaktur Indonesia yang sangat tidak kompetitif dengan Tiongkok. Banyak masyarakat Indonesia yang memandang ACFTA sebagai instrumen untuk memperkuat interdependensi kawasan ASEAN dengan Tiongkok. (Both, 2011)

Tinjauan pustaka yang **ketiga** diambil dari tulisan Rahul Mishra dan Irfa Puspita Sari dengan judul paper “Indonesia-China Relations: Challenges and Oppurtunies” yang diterbitkan tahun 2010, IDSA Issue Brief. Rahul dan Irfa mengungkapkan bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok masih dibayangi oleh hubungan ASEAN-Tiongkok. Jika Tiongkok tetap pada posisinya untuk tidak terlibat dalam urusan politik dalam negeri Indonesia, hubungan kedua negara akan tetap terjalin erat. Apalagi Indonesia dan Tiongkok sudah menandatangani kerja sama kemitraan strategis. Akibatnya hal

tersebut akan membawa lebih banyak kesempatan untuk peningkatan hubungan ekonomi. Mereka berargumen bahwa pada masa pemerintahan Barrack Obama, politik luar negeri Amerika Serikat (AS) beralih ke pendekatan negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara melalui kerangka ASEAN. Baik Tiongkok maupun AS tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara dengan perekonomian paling melimpah di ASEAN. (Mishra & Sari, 2010)

Tinjauan **keempat** adalah tulisan dari Alexander C. Chandra dan Lucky A. Lontoh dengan judul paper “Indonesia-China Trade Relations: The deepening of economic integration amid uncertainty” pada tahun 2010, International Institute for Sustainable Development. Alexander dan Lucky memiliki argumentasi yang skeptis tentang hubungan Ekonomi Indonesia-Tiongkok dalam kerangka ACFTA. mereka berpendapat bahwa Indonesia belum siap untuk pengaturan perdagangan bebas. Opini publik di Indonesia memandang bahwa pemerintah tidak dapat memanfaatkan FTA ini untuk mendongkrak perekonomian domestik. Di sisi Indonesia, pasar Indonesia dibanjiri barang-barang murah dari Tiongkok. Mereka juga berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil kesempatan ini untuk lebih menkankan kerja sama bilateral dengan Tiongkok guna mempercepat perekonomian domestik Indonesia. (Chandra & Lontoh, 2011)

Tinjauan **kelima** adalah tulisan dari Maddaremmeng A. Panennugi, dengan judul working paper “ASEAN-China Economic Relations: A View from Indonesia” yang terbit tahun 2015 dalam Economic and Business, Vol. V No.2/2015, University of Indonesia. Ia berkesimpulan bahwa Indonesia belum siap dengan pengaturan perdagangan bebas seperti FTA dalam kerangka ACFTA. Meskipun hubungan bilateral kedua belah pihak relatif baik secara ekonomi dan politik, namun pemerintah Indonesia masih belum mampu memenuhi kondisi perekonomian domestiknya secara komprehensif. Ia juga berpendapat bahwa terlepas dari perekonomian Indonesia saat ini, prospek hubungan ekonomi dengan Tiongkok akan terkaselerasi jika Indonesia bergabung dalam inisiasi Tiongkok pada *one belt one road*, hal tersebut merupakan peluang baik untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia yang selanjutnya perekonomian domestik akan ikut bangkit. Selanjutnya hal tersebut akan mendorong kepuasan masyarakat terhadap pemerintah tak diragukan lagi meningkat. (Panennugi, 2015)

Faktor Politik Domestik

Pada akhir tahun 90-an Indonesia memasuki babak baru dalam sistem politik domestik dengan mengadopsi demokrasi gaya barat dalam konstitusinya dan faktor-faktor ini tidak diragukan lagi mempengaruhi politik luar negeri Indonesia dalam banyak hal.

Pada awal masa kepemimpinan Suharto, Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok, karena ketegangan politik di antara mereka. Sedangkan pada periode Soekarno hubungan Indonesia dan Tiongkok cukup baik.

Tinjauan pustaka **keenam** adalah tulisan dari Hafid A. P. dengan judul "Presepsi Soeharto dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Cina pada Awal Orde Baru" yang dimuat dalam jurnal Indonesian Perspective pada tahun 2016. Hafid berpendapat, perubahan arah politik luar negeri di Indonesia pada masa Soeharto karena persepsi pribadi Soeharto bahwa Tiongkok terlibat pada kejadian G-30 S tahun 1965, Tiongkok sangat mungkin menjadi ancaman bagi stabilitas kemanana dan politik domestik Indonesia. Tuduhan Soeharto mengenai keterlibatan Tiongkok dalam peristiwa G-30 S tidak hanya harus didasarkan pada bukti sejarah tentang keterlibatan Tiongkok di masa lalu, tetapi juga diperkuat oleh bukti dinamika politik yang terjadi pada pemerintahan Sukarno. Oleh karena itu, peristiwa G-30 S menimbulkan kesan yang dalam di kalangan militer, terutama Soeharto, atas keterlibatan Tiongkok dalam peristiwa tersebut. Penilaian keterlibatan Tiongkok tidak dapat dipisahkan dengan bukti bahwa PKI (Partai Komunis Indonesia) berusaha membentuk Angkatan Kelima, dengan mencari bantuan Tiongkok atas persetujuan Sukarno. (A.P., 2016)

Contoh lain bagaimana politik dalam negeri mempengaruhi politik luar negeri Indonesia disampaikan oleh Johannes yang merupakan tinjauan pustaka **ketujuh**, dalam tulisannya yang berjudul "How the Indonesian Elite Regards Relations with China" yang diterbitkan pada 2017 oleh Yusof Ishak Institute. Johannes mendasarkan argumennya pada satu sisi positif dan negatif dari mayoritas elit pribumi. Ada tiga inti pandangan elit: elit di luar pemerintahan yang melihat hubungan dengan Tiongkok dapat membawa dampak negatif, elit lain di luar pemerintahan melihat dapat membawa pendapatan positif bagi Indonesia, dan elit di dalam lingkaran pemerintahan. (Herlijanto, 2017)

Pandangan elit Pribumi tentang hubungan Indonesia-Tiongkok terpecah. Pertama, ini membuktikan kepada kita bahwa keinginan pemerintah untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok tidak didukung dengan suara mayoritas. Kedua, di tingkatan pemerintah, adanya sikap curiga terhadap Tiongkok, meski hanya di antara segelintir pejabat pemerintah, telah memperlambat upaya Jokowi untuk menjalin hubungan intim dengan Tiongkok. Dengan demikian, dampak dari persepsi negatif tersebut mungkin bukan pada pembuatan kebijakan, tetapi pada realisasi kebijakan. Hal tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh lingkaran dalam presiden. Argumentasi Johannes mencerminkan bahwa elit memiliki pengaruh yang kuat untuk membentuk kembali proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri pemerintah. (Herlijanto, 2017)

Tinjauan pustaka **kedelapan** adalah tulisan yang dibuat oleh Iis Gindarsah seorang peneliti pada Centre for Strategic and International Defence Jakarta, yang berjudul "Democracy and Foreign Policy-Making in Indonesia: A Case Study of the Iranian Nuclear Issue, 2007-08" yang diterbitkan pada tahun 2012, oleh Yusof Ishak Institute. Ia menggambarkan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia dari sudut pandang politik dalam negeri. Dalam artikelnya, ia memaparkan hubungan antara sistem demokrasi yang dianut Indonesia pada awal tahun 2000-an dengan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia. Menggunakan studi kasus sanksi Nuklir Iran pada masa keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB, Gindarsah berhasil menemukan bukti bahwa opini publik sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri pemerintah menjadi output dari kebijakan luar negeri. (Gindarsah, 2012)

Tabel 2.1. Rangkuman Tinjauan Pustaka

Nama Penulis	Argumen	Pendekatan	Level of Analysis
Wu	Hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok didasarkan pada Faktor Ekonomi	Ekonomi Politik Internasional	3rd Level of Analysis
Anne Both	Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia disebabkan oleh Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok	Ekonomi Politik Internasional	3rd Level of Analysis
Rahul and Ifra	Hubungan Indonesia-China masih dibayangi oleh Hubungan ASEAN-China	Ekonomi Politik Internasional	3rd Level of Analysis

Alexander and Lucky	Hubungan Indonesia-China masih dibentuk dalam Kerangka ASEAN	Ekonomi Politik Internasional	3rd Level of Analysis
Maddaremmeng	Hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok masih relatif baik tetapi Indonesia belum siap untuk FTA	Ekonomi Politik Internasional	3rd Level of Analysis
Hafid	Pendekatan Personal terhadap Gaya Kepemimpinan Suharto yang Mempengaruhi Hubungan Indonesia-Tiongkok	Politik Domestik	1st Level of Analysis
Johanes	Kelompok Elite dapat mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok	Politik Domestik	2nd Level of Analysis
Ginarsah	Politik Domestik dan Opini Publik dapat mempengaruhi Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Studi Kasus sanksi nuklir Iran	Politik Domestik	2nd Level of Analysis

BAB III

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pandangan Indonesia terhadap hasil kebijakan luar negerinya untuk bekerja sama dengan China untuk proyek infrastruktur dan strategis yang signifikan. Penggunaan pandangan Indonesia berarti penelitian ini menjelaskan hasil kebijakan luar negeri dari sudut pandang Indonesia. Alasan utama untuk menggunakan pandangan Indonesia karena terbatasnya penelitian yang menganalisis dan menjelaskan masalah hasil politik luar negeri Indonesia dari lingkungan politik dalam negeri lebih spesifik pengaruh opini publik dalam subjek proses pembuatan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, tinjauan pustaka kemungkinan besar didasarkan pada pendekatan terhadap hubungan ASEAN atau (ACFTA) dan Tiongkok-Indonesia terhadap kawasan Asia Tenggara, yang didasarkan pada ekonomi politik internasional daripada analisis kebijakan luar negeri.

Tinjauan pustaka berpendapat bahwa hubungan Indonesia-China didasarkan pada kepentingan ekonomi dalam perdagangan dan investasi (Wu, 2011) ;. Sementara itu, beberapa pasal masih menangkap hubungan berbasis ekonomi tetapi dengan wilayah yang lebih luas dengan kerangka ASEAN dalam fokus ACFTA (Booth, 2011); (Alexander & Lucky, 2011); (Misra & Sari, 2010); (Maddaremmeng, 2015). Pandangan yang sedikit berbeda menunjukkan bahwa elit domestik dapat membentuk kembali hasil kebijakan luar negeri Indonesia (Johanes, 2017). Lebih lanjut, artikel lain secara eksplisit menyebutkan pentingnya sudut pandang pemimpin dalam pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia dengan China (Hafid, 2016). Selain itu, terdapat keterkaitan antara opini publik dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di Indonesia (Gindarsah, 2012).

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian yang menggunakan outlook pendekatan opini publik domestik Indonesia masih jauh tertinggal dari penelitian pandangan ekonomi politik internasional. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengisi gap antara pendekatan tersebut dan berkontribusi pada penelitian tentang pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia dari pendekatan opini publik Indonesia. Selain itu, pandangan lingkungan politik domestik Indonesia

mengelaborasi iklim dan dinamika opini publik Indonesia terkait dengan pertimbangan pemimpin dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

Dalam menganalisis masalah penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Alan Bryman penelitian kualitatif merupakan strategi penelitian yang biasanya menekankan pada kata-kata dan bukan pada kuantifikasi dalam dataset dan analisis. Sifatnya adalah induktif, konstruktif, dan interpretatif meskipun peneliti kualitatif tidak selalu memasukkan ketiga unsur tersebut. (Alan, 2004)

Analisis penelitian dilakukan dengan pengumpulan data dengan studi kasus yang dipelajari. Bentuk datanya pada umumnya berupa dokumen ilmiah dan literatur untuk menunjang penelitian. Dokumen dan literatur berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui buku teks; laporan politik Cina dan Indonesia; jurnal politik dan ekonomi. Data statistik yang matang dari situs resmi, atau publikasi KPU Republik Indonesia; Kantor Kepresidenan Republik Indonesia; Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia; serta artikel berita politik dan ekonomi.

Data ini diperoleh dari beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta, situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, situs resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, makalah, jurnal dan surat kabar online, dan beberapa sumber lainnya.

Kerangka Pemikiran

Secara umum, dua jenis teori dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena politik internasional. Teori pertama adalah teori reduksionis, yaitu teori yang menitikberatkan pada tingkat individu atau nasional. Sedangkan teori kedua adalah teori sistemik, yaitu teori yang menitikberatkan pada penjelasan sistem internasional. Analisis kebijakan luar negeri merupakan salah satu jenis teori di tingkat nasional dan menitikberatkan pada penjelasan proses pembuatan kebijakan dan alasan di balik tindakan yang dilakukan oleh suatu negara. (Waltz, 1979)

Politik luar negeri adalah kebijakan yang dirumuskan dan diambil untuk mengatur hubungan suatu negara dengan negara lain. Namun, politik luar negeri tidak bisa lepas dari politik domestik. Menurut Fearon, politik dalam negeri memiliki peran krusial dalam menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara. Politik luar

negeri merupakan alat untuk pembentukan politik Internasional, dimana politik luar negeri sendiri merupakan perpanjangan dari politik dalam negeri yang mewujudkan kepentingan dan tujuan nasional. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menganalisis politik luar negeri suatu negara dari situasi politik domestik negara tersebut. (Fearon, 1998)

Fearon menjelaskan dua teori untuk memahami kebijakan luar negeri: teori sistemik dan teori politik domestik. Teori sistemik memandang negara sebagai aktor yang rasional dan bersatu. Teori ini menjelaskan bahwa para pelaku aktor hubungan internasional selalu terhubung satu sama lain sehingga satu negara akan mempertimbangkan perilaku negara lain sebelum mengambil kebijakan tertentu. Suatu negara memiliki persepsi atas tindakan yang dilakukan atau akan dilakukan oleh negara lain sehingga negara tersebut harus memberikan perhatian dan respon terhadap lingkungan internasional. (Fearon, 1998)

Definisi Konseptual

a. Teori Politik Domestik

Teori politik domestik memperdebatkan tentang karakter spesifik dari negara yang bersangkutan untuk menjelaskan berbagai pilihan kebijakan atau interaksi politik tertentu yang membawa keberagaman implementasi kebijakan. Kebijakan yang kurang optimal dijelaskan oleh penambahan terkait sudut pandang suatu negara yang tidak terkait dengan unit-unit yang terlibat dalam perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, seperti rezim yang berlaku atau tujuan khusus dari kebijakan tersebut. Misalnya, kebijakan yang kurang optimal dapat ditelusuri dari prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan luar negeri atau dari preferensi personal pemimpin pembuat keputusan untuk mempertahankan kekuasaan. Analisis kebijakan luar negeri melalui tingkat analisis politik dalam negeri menjadi vital karena politik dalam negeri menyebabkan suatu negara mengambil kebijakan yang kurang optimal, baik untuk kepentingan negaranya sendiri maupun untuk mempengaruhi lingkungan internasional. Analisis politik dalam negeri juga penting untuk memahami bagaimana perbedaan institusi politik, budaya, struktur ekonomi, atau tujuan kepemimpinan suatu negara, mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri. (Fearon, 1998)

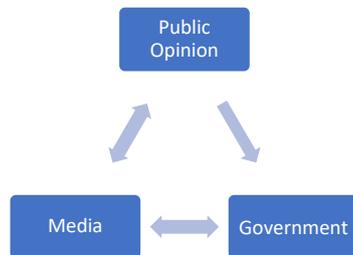
Kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan internasional tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di lingkungan domestik negara itu sendiri. Oleh karena itu, politik dalam negeri dapat digunakan sebagai salah satu level analisis dalam menganalisis politik luar negeri. Jika analisis level sistemik menjelaskan bagaimana suatu negara mengambil kebijakan luar negeri untuk merespon lingkungan internasional, maka level analisis politik dalam negeri pada dasarnya menjelaskan mengapa dan bagaimana faktor domestik mempengaruhi perumusan dan keputusan kebijakan luar negeri. Analisis politik tingkat domestik menjadi penting ketika tingkat analisis sistemik saja tidak dapat menjelaskan hubungan antara kebijakan suatu negara dan lingkungannya sehingga dinamika internal digunakan untuk melacak insentif yang mendasari kebijakan tersebut.

Politik dalam negeri pada dasarnya sangat dinamis dan beragam. Afiliasi politik baik yang demokratis atau otoriter memiliki peran penting dalam memahami sifat perilakunya politik dalam negeri. Indonesia telah mengubah sistem politik dalam negeri dari model otoriter menjadi mengadopsi sistem demokrasi dalam dua dekade terakhir tepatnya ketika rezim Suharto jatuh pada tahun 1998. Sejak saat itu, transisi politik harus menjadi sistem demokrasi Indonesia yang matang. Tonggaknya adalah pemilihan presiden tahun 2004. Ketika sekitar 114 juta masyarakat Indonesia, yang berhak memilih, hadir di TPS untuk memberikan suara mereka pada pemilihan presiden langsung nasional pertama.

b. Teori Opini Publik

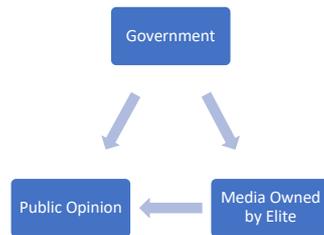
Sistem demokrasi tidak dapat dihindari berdampak besar pada lingkungan politik domestik Indonesia. Kebebasan berbicara dan akuntabilitas pemerintah membawa celah bagi peran opini publik dalam pembuatan kebijakan nasional. Dengan demikian, opini publik dapat digunakan sebagai alat utama untuk menganalisis pengambilan keputusan kebijakan luar negeri di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Robinson dalam buku *foreign policy: Theories, Actors, Cases* terbitan Oxford University Press mengemukakan bahwa pandangan untuk mendukung opini publik terbagi dalam dua kategori, yaitu pluralist model dan elite model. (Source)



Gambar 3.1. Pluralist Model

Premis model pluralis adalah masyarakat memiliki kekuatannya sendiri. Dengan demikian, masyarakat (publik dan media) memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada pemerintah yang berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu dalam model pluralis meyakini bahwa opini publik berdiri sendiri tanpa pengaruh pemerintah, selain itu pemerintah harus memperhitungkan opini publik dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.



Gambar 3.2. Elite Model

Sedangkan premis model elit adalah poros kekuasaan yang secara dominan memadat di dalam kelompok elit, dimana mereka memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Dalam model ini, pemerintah mengontrol opini publik. Media sebagai pasangan opini publik yang tak tergantung berperan sebagai agen pemerintah untuk menggerakkan agendanya, dan mendapatkan dukungan dari publik. Sampai batas tertentu dalam pemerintahan otoriter, media bertindak sebagai alat propaganda untuk kebijakan pemerintah. Sistem politik demokrasi terkait dengan premis pluralis bahwa masyarakat memiliki kekuasaannya, dan tindakan pemerintah sebagai amanah masyarakat untuk mengatur penyelenggaraan negara. Untuk itu, pemerintah perlu memuaskan opini publik untuk mempertahankan posisi politiknya dalam sistem politik demokrasi.

2. Oprasionalisasi Konsep

a. Isolationist dan Internationalist

Robinson juga mendefinisikan opini publik menjadi dua kategori, Isolationist dan Internationalist dengan analogi warga AS. Isolationis mengkategorikan sebagai warga negara yang menentang keterlibatan pemerintahnya dalam urusan global. Paradoksnya, internasionalis adalah warga negara yang mendukung peran aktif pemerintah dalam urusan global. (Source)



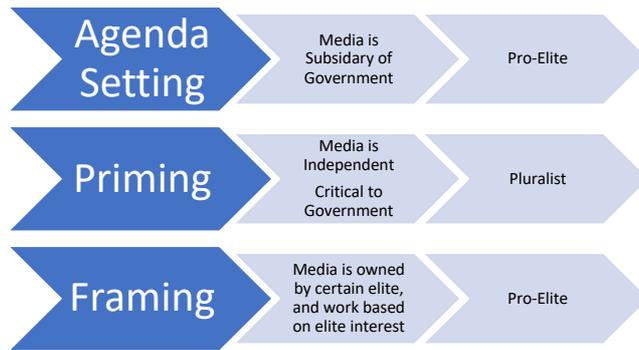
Gambar 3.3. Isolationist & Internationalist Model In Society

Media adalah pasangan opini publik yang tak tergantikan, setiap kali mereka secara aktif bertindak independen sebagai pengawas kinerja pemerintah, atau bawahan pemerintah untuk mempengaruhi opini publik untuk memastikan kepentingan politik dan dukungan dari publik. Selanjutnya, Robinson mengklasifikasikan bagaimana media bekerja untuk mempengaruhi opini publik baik dalam tindakan yang lebih pro pluralis vis-a-vis pro elite yaitu sebagai Agenda Setting, Priming, dan Framing. (Source)

b. Agenda Setting, Priming, dan Framing

Agenda Setting mengacu pada peran media sebagai bawahan pemerintah yang lebih berpihak pada elit. Media berusaha mempengaruhi perhatian publik untuk menyadarkan dan mendukung agenda pemerintah pada isu tertentu. Sebaliknya, dalam priming, media berusaha melawan pemerintah dengan cara mengkritisi kebijakan pemerintah dan mendapatkan kesadaran publik untuk mendorong pemerintah baik membatalkan keputusan kebijakan mereka saat ini maupun membatalkan wacana pengambilan keputusan kebijakan. Terakhir adalah framing, dengan cara ini, karya media dari waktu ke waktu berfluktuasi baik yang pro pluralis maupun pro elit. Media menangkap masalah dari sudut yang berbeda untuk mempengaruhi opini publik. Dalam kasus yang sama, konten dan kedudukan media

bisa sangat berbeda. Akibatnya, reaksi opini publik juga berbeda dalam menyikapi isu yang pada kenyataannya sama.



Gambar 3.4. Agenda Setting, Priming, Framing Model In Media

Hampir tidak mungkin jika menggunakan pendekatan realis, dimana negara adalah aktor utama yang memiliki kekuasaan dalam hubungan internasional untuk menganalisis kasus dengan menggunakan opini publik sebagai alat penelitian. Cara yang paling mungkin untuk mengeksekusi kasus dengan menggunakan analisis opini publik adalah melalui pendekatan liberalisme yang berkaitan dengan demokrasi. Dengan cara ini, opini publik diakui sebagai pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan politik luar negeri. Sedangkan pendekatan kritis yang berfokus pada kelas sosial ekonomi dan pemerintah sebagai anak perusahaannya, media merupakan alat bagi beberapa elit untuk memanipulasi opini publik untuk kepentingan mereka.

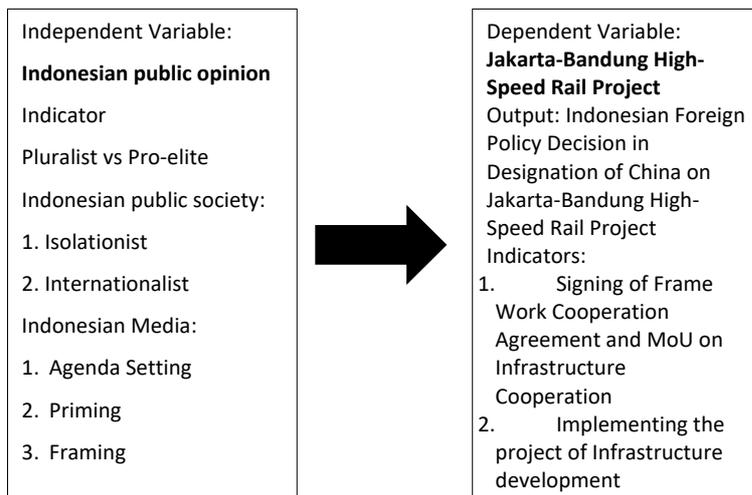
Model analisis di digunakan untuk menjelaskan penelitian ini, penelitian ini dimulai dengan mempelajari variabel-variabel independen untuk mengklasifikasikan opini publik Indonesia. Apakah mereka cenderung pluralis atau pro elit. Indikator masyarakat publik Indonesia akan memperdalam proses analitik ke subjek yaitu publik itu sendiri. Terakhir, bagaimana media di Indonesia berdiri, apakah mereka independen atau hanya bawahan pemerintah. Konsekuensinya, variabel independen tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Akibatnya, output variabel dependen dalam keputusan kebijakan luar negeri.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh opini publik terhadap keputusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung relatif signifikan. Karena sebelumnya Jepang ditunjuk untuk melakukan studi kelayakan pada proyek ini. Sistem demokrasi berhasil menjadikan opini publik menjadi pertimbangan pemerintah. Selanjutnya, mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri pemerintah, yang menjadikan China sebagai mitra proyek.

Model Analisis

Gambar 3.5. Model Analisis



BAB IV

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Inisiasi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Inisiasi proyek yang dimulai pada masa SBY, Jepang merupakan calon mitra proyek yang kuat, namun proses politik luar negeri tidak menghasilkan keluaran pada periode SBY. Beberapa faktor dapat menjelaskan mengapa dalam hal ini input opsi kebijakan tidak menghasilkan output kebijakannya. Faktor-faktor tersebut menurut alat analisisnya adalah kecenderungan internasionalis dalam lingkungan politik domestik Indonesia pada masa SBY, tidak mendukung kebijakan SBY karena gagal meraih posisi Indonesia yang kuat di dunia internasional akibat kebijakan SBY Sejuta Teman Tanpa Musuh. Oleh karena itu masalah proyek kereta cepat ini tidak cukup penting untuk mendapat perhatian media baru, ada lagi masalah politik dalam negeri dalam skala yang lebih signifikan yang mendapat perhatian pengguna media baru. Jadi, media tradisional yang berbasis pada elite player berperan dalam mempengaruhi opini publik. Selain itu, elit tidak terlalu berafiliasi dengan pemerintah incumbent, sehingga terbagi media dengan mendukung dan menentang agenda pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan elit.

Pola masyarakat pada Pemilu 2009

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU 9 parpol yang berhak mewakili DPR periode 2009-2014. Yakni Partai Demokrat (Demokrat) mewakili 26,4% dari total suara, Partai Golkar (Golkar) mewakili 18,9% dari total suara. Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) mewakili 16,8% dari total suara. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili 10,2% dari total suara. Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili 8,2% dari total suara. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili 6,8% dari total suara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili 5% dari total suara Partai Gerindra (Gerindra) mewakili 4,6% dari total suara. Apalagi, Partai Hanura (Hanura) mewakili 3% dari total suara. 0,1% suara lainnya tidak hadir di DPR karena adanya ambang batas parlemen 2,5%. (Kompas.com, 2009)

Tabel 4.1. Data Rekapitulasi Pemilu 2009

Nama Partai	Presentasi Pada Pemilu 2009	Ideologi	Affiliasi konsep
Demokrat	26,4 %	Nasionalist-Liberalist	Pluralist/ Internationalist
Golkar	18,9 %	Nasionalist-Liberalist	Pluralist/ Internationalist
PDI-P	16,8 %	Nasionalist-Socialist	Pro-Elite/Isolationist
PKS	10,2%	Islamist-Conservative	Pro-Elite/Isolationist
PAN	8,2%	Islamist-Liberalist	Pluralist/ Internationalist
PPP	6,8%	Islamist-Conservative	Pro-Elite/Isolationist
PKB	5%	Islamist-Liberalist	Pluralist/ Internationalist
Gerindra	4,6%	Nasionalist-Socialist	Pro-Elite/Isolationist
Hanura	3%	Nasionalist-Socialist	Pro-Elite/Isolationist
Tidak masuk kualifikasi	0,1%	No Data	No Data

Data di terbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dimuat pada Kompas 9 Mei 2009.¹ (Kompas.com, 2009)

Dari tabel terlihat bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung Internasionalis dalam pemilihan umum 2009. Indikatornya adalah dua partai teratas di parlemen yang mewakili 45,3% total pemilih sementara juga memilih Presiden SBY yang sedang menjabat juga dari Partai Demokrat yang pendekatan kebijakannya Pluralis. Jika digabung dengan partai lain yang juga mewakili pemilih Pro-Internasionalis persentasenya meningkat menjadi 58,5%. Sementara itu, meski partai yang mewakili pemilih pro-Isolationis menempati urutan ke-3 (PDI dengan 16,8%), namun sebanyak 41,4% berada di belakang Pro-Internasionalis. 0,1% suara lainnya tidak hadir di DPR karena 2,5% ambang batas parlemen.

Politik dalam negeri Internasionalis dan Kebijakan SBY “*Million Friends Zero Enemy*”

Rezim yang dijanjikan SBY pada kampanye presiden 2009 akan membuat peran Indonesia semakin meningkat di dunia internasional. Berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Namun, kenyataan di masa pemerintahannya, rezim SBY telah gagal memenuhi salah satu janji politik tersebut. Pada pembukaan UUD 1945 ayat I dan ayat IV telah dijelaskan dasar hukum penyelenggaraan politik luar negeri di Indonesia. Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat berhak

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2009/05/09/22401496/inilah.hasil.akhir.perolehan.suara.nasional.pemilu>

menentukan nasibnya sendiri dan berhak mengatur hubungan kerja sama dengan Negara lain. Pengertian politik luar negeri Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2), yaitu kebijakan, sikap dan langkah rezim SBY diambil dalam kaitannya dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya secara tertib. menghadapi masalah internasional untuk mencapai tujuan nasional.

Di bawah konstitusi, rezim SBY harus menerapkan politik luar negeri yang disebut politik bebas aktif. Artinya, Indonesia bebas menentukan sikap terkait dunia internasional, tidak memihak salah satu penghambat. Aktif sehingga ikut berkontribusi baik dalam bentuk berfikir maupun menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan dunia. Aktif menunjukkan kewajiban rezim SBY untuk memenuhi amanat UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun, rezim SBY memiliki gagasan "Sejuta Teman, Musuh Nol", untuk menjadi visi kebijakan luar negeri. Dalam motto "Thousand Friends, Zero Musuh" ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara cinta damai, yang tegas menentang segala bentuk penjajahan di dunia. Motto ini banyak dikritik. Kasus-kasus yang dijadikan dasar penilaian rezim SBY dengan "semboyan" dinilai kurang tegas terhadap ancaman eksternal, yaitu: 1. Pencaplokan Wilayah Perbatasan Republik Indonesia. SBY telah mengizinkan pencaplokan wilayah perbatasan Indonesia oleh Malaysia untuk menciptakan "musuh nol". Wilayah Indonesia yang akan hilang harus dipertahankan negara dengan sekuat tenaga. Membela seluruh tumpahan darah Indonesia adalah tugas suci sebagai bangsa yang berdaulat. 2. Pengerahan 2.500 Marinir AS di Darwin, Australia.

Berdasarkan data pada bagian-bagian sebelumnya tentang hasil Pemilu 2009. Terlihat bahwa mayoritas masyarakat cenderung berpihak pada internasionalis. Selanjutnya, proporsi parlemen juga didominasi oleh calon dari partai yang ideologinya cenderung internasionalis. Selain itu, SBY yang menjadi Prioritas kebijakan Million Friends Zero Enemy adalah meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional.

Jalan Menuju Pemilu Presiden dan Pemilihan Umum 2014 SBY dan Legislatif

Setelah kemenangan pemilihan presiden 2009, SBY memasuki periode kedua pemerintahan. Sejak Indonesia mengadopsi demokrasi ke dalam sistem pemerintahan, presiden yang sedang menjabat tidak berhak untuk mengajukan pemilihan presiden berikutnya untuk satu periode berikutnya. Akibatnya, faktor-faktor tersebut menarik minat SBY untuk menyisakan sedikit warisan dari masa kepresidenannya.

High-Speed Rail-Project memang merupakan proyek "Legacy" buatan SBY untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat agar namanya dikenang. Realitas mayoritas anggota parlemen adalah dari partai koalisi dimana partai yang merupakan mayoritas dalam pemerintahan juga berperan dalam kasus ini. Tetap tidak memiliki pendirian yang jelas untuk badan legislatif, masing-masing partai memiliki kepentingannya sendiri, dan partai oposisi juga memiliki andil yang cukup besar di parlemen. Sementara itu, oposisi tidak memiliki perwakilan di kabinet eksekutif.

Tabel 4.2. Komposisi Kabinet SBY 2009

No	Nama menteri	Nama Kementerian	Afiliasi
1	Djoko Suyanto	Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs	Technocrat
2	Hatta Rajasa	Coordinating Ministry for Economic Affairs	PAN
3	Agung Laksono	Coordinating Ministry for People's Welfare	Golkar
4	Sudi Silalahi	Ministry of State Secretariat	Technocrat
5	Gamawan Fauzi	Ministry of Home Affairs	Technocrat
6	Marty Natalegawa	Ministry of Foreign Affairs	Technocrat
7	Purnomo Yusgiantoro	Ministry of Defense	Technocrat
8	Patrialis Akbar	Ministry of Justice and Human Rights	PAN
9	Sri Mulyani	Ministry of Finance	Technocrat
10	Darwin Zahedy Saleh	Ministry of Energy and Mineral Resources	Democrat Party
11	MS Hidayat	Ministry of Industry	Golkar
12	Mari Elka Pangestu	Ministry of Trade	Technocrat
13	Suswono	Ministry of Agriculture	Technocrat
14	Syarif Hasan	Ministry of Cooperatives and SMEs	Democrat Party
15	Freddy Numberi	Ministry of Transportation	Democrat Party
16	Fadel Muhammad	Ministry of Marine Affairs and Fisheries	Golkar
17	Muhaimin Iskandar	Ministry of Manpower and Transmigration	PKB
18	Djoko kirmanto	Ministry of Public Works	Technocrat

19	Nila Afansa Moeloek	Ministry of Health	Technocrat
20	Muhammad Nuh	Ministry of Education	Technocrat
21	Suryadharma Ali	Ministry of Religious Affairs	PPP
22	Jero Wacik	Ministry of Tourism and Culture	Democrat Party
23	Suharna Surapranata	Ministry of Research and Technology	PKS
24	Salim Segaf Al'jufrie	Ministry of Social Affairs	PKS
25	Gusti Moh Hatta	Ministry of Environment	Technocrat
26	Zulkifli Hasan	Ministry of Forestry	PAN
27	Linda Agum Gumelar	Ministry of Women's Empowerment and Child Protection	Technocrat
28	EE Mangindaan	Ministry of State Apparatus Empowerment	Democrat Party
29	Helmy Faisal Zaini	Ministry of Acceleration of Development of Disadvantaged Regions	PKB
30	Armida Alisjahbana	Ministry Planning and Development	Technocrat
31	Mustafa Abubakar	Ministry of State-Owned Enterprises	Golkar
32	Tifatul Sembiring	Ministry of Communication and Information	PKS
33	Suharso Momoarfa	Ministry of Public Housing	PPP
34	Andi Mallarangeng	Ministry of Youth and Sports	Democrat Party
35	Sutanto	Head of the State Intelligence Agency	Technocrat
36	Gita Wirjawan	Head of Investment Coordinating Board	Technocrat

Data Diterbitkan di Kompas 21 Oktober 2009 (Hertanto, 2009)

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar anggota kabinet berlatar belakang partai setuju, beberapa partai yang berkoalisi di parlemen juga memiliki kursi di kabinet presiden yaitu: Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PKS. Bersama PDI-P dan Golkar, koalisi ini mendapat porsi mayoritas di parlemen atau 58,05 persen.

Media yang dijalankan oleh kelompok Elite

Berdasarkan survei Nilsen yang dipublikasikan Mei 2014, sebagian besar masyarakat di Indonesia masih memilih Televisi sebagai media untuk mendapatkan informasi. Setidaknya lebih dari 95% orang Indonesia menggunakannya. Karena itu, televisi merupakan sumber alami untuk menyebarkan informasi kepada publik. Sementara itu, kredibilitas saluran televisi independen dalam hal ini saluran berita 24 jam diragukan. Dilihat dari survei Nilsen, media televisi Berita 24 Jam utama masih dimiliki oleh kalangan elit. Yaitu Surya Paloh (Grup Media Indonesia, Metro TV) dan Aburizal Bakrie (Grup Bakrie, Di Bawah Anak Perusahaan Grup Viva, TVOne).

Tabel 4.3 Korelasi Antara Media dan Kelompok Elit

Name	Affiliation	Party Status in Government	Pro-Government or Opposition
Surya Paloh	NasDem	New Party	Oppose Government

Aburizal Bakrie	Golkar-Chairman of the Board of Trustees	Coalition Party, Government Party	Pro-Government
-----------------	--	-----------------------------------	----------------

Sebelum Pemilu 2009, sejumlah petinggi Golkar melakukan sejumlah manuver politik. Dua kader senior Golkar di belakang militer dan jenderal lapangan memprakarsai pembentukan dua partai baru. Jenderal bintang empat, Wiranto, yang juga mantan Panglima TNI dan mantan calon presiden yang diusung Golkar pada 2004, pada 14 November 2006 Wiranto mendirikan partai baru bernama Hanura (Hati Nurani Rakyat) dan satu lagi Letnan Jenderal Prabowo. Prabowo mendirikan Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) pada 6 Februari 2008. Dalam Pemilu Legislatif 2009, kedua partai yang dibentuk oleh dua mantan kader senior Golkar ini sama-sama mampu meraih lebih dari 3% suara, dengan kursi di DPR RI. (DPR) direbut oleh Hanura sebanyak 18 kursi dan Gerindra sebanyak 26 kursi legislatif.

Di penghujung 2009 (07 November), usai pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, Golkar menggelar Majelis Nasional untuk memilih ketua baru di Riau. Jusuf Kalla yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dari 2004 hingga 2009 dan baru kalah pada pemilihan presiden 2009 (berpasangan dengan Wiranto, diusung Golkar dan Hanura) tidak mencalonkan diri lagi pada pemilihan kedua ketua Golkar. Pada Sidang Umum Nasional Golkar 2009, ada beberapa nama calon yang muncul ke permukaan, antara lain Surya Paloh (sebelumnya Ketua Dewan Pembina Partai Golkar pada masa Jusuf Kalla), Aburizal Bakrie (saat itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian). Untuk Kesejahteraan Rakyat) Yudi Chrisnandi (kader muda Golkar) dan Tommy Soeharto, anak mantan penguasa Orde Baru yang kala itu bebas dari penjara.

Perebutan kursi Ketua Umum Golkar pada 2009 saat itu sebenarnya adalah perebutan kekuasaan antara Aburizal Bakrie dan Surya Paloh serta pertarungan bergengsi antara Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung. Saat itu Surya Paloh didukung oleh Jusuf Kalla (karena pada masa kepemimpinan Kalla, Surya Paloh adalah Ketua Dewan Pertimbangan Golkar) dan Aburizal Bakrie didukung oleh musuh Jusuf Kalla yang dikalahkannya pada tahun 2004 di Nusa Dua Bali, Akbar. Tanjung. Majelis Nasional Golkar yang digelar di Pekanbaru Riau akhirnya dimenangkan oleh Aburizal Bakrie yang meraih 296 suara dari total 537 suara, sedangkan Surya Paloh meraih 240 suara. Aburizal Bakrie mengungguli Surya Paloh dengan 56 suara lebih

tinggi, sedangkan Yudy dan Tommy dalam pemilu tidak mencapai satu suara pun. Fragmentasi pemilik media tersebut menciptakan gap antara dua posisi media dominan yang berdiri, apa pun yang mendukung atau menentang kebijakan pemerintah.

Pelaksanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Periode Jokowi (2014-2015)

Meski inisiasi proyek dimulai pada masa SBY, namun keputusan politik luar negeri sudah dilakukan pada masa Jokowi. Sebelumnya Jepang adalah calon yang kuat untuk menjadi mitra proyek, tetapi keluaran kebijakan luar negeri telah berubah menjadi Cina yang dicalonkan sebagai mitra proyek. Dalam hal ini, terjadi bahwa opsi kebijakan telah berubah ketika kebijakan dikeluarkan.

Beberapa faktor dapat menjelaskan mengapa dalam hal ini input opsi kebijakan tidak sama dengan output kebijakan. Faktor-faktor tersebut menurut alat analisisnya adalah kecenderungan isolasionis dalam lingkungan politik domestik Indonesia periode Jokowi, didukung pula oleh kebijakan isolasionis Jokowi Nawacita. Oleh karena itu masalah proyek kereta cepat ini tidak cukup penting untuk mendapat perhatian media baru, ada lagi masalah politik dalam negeri dalam skala yang lebih signifikan yang mendapat perhatian pengguna media baru. Jadi, media tradisional yang berbasis pada elite player berperan dalam mempengaruhi opini publik. Selain itu, elite merupakan afiliasi dengan kalangan pemerintahan incumbent sehingga menjadi media untuk mendukung agenda pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan elit.

Pola masyarakat pada Pemilu 2014

Setelah KPU 2014 juga mengeluarkan data rekapitulasi resmi Pemilu 2014. Persentase minimum ambang batas parlemen naik dari 2,5% pada 2009 menjadi 3,5% untuk kursi DPR. Hasilnya, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) mewakili 18,95% dari total suara. Partai Golkar (Golkar) mewakili 14,75% dari total suara. Partai Gerindra (Gerindra) mewakili 11,81% dari total suara. Partai Demokrat (Demokrat) mewakili 10,19% dari total suara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili 9,04% dari total suara. Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili 7,59% dari total suara. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili 6,79% dari total suara. Partai Nasional Demokrat (NasDem) mewakili 6,72% dari total suara. Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) mewakili 6,53% dari total suara. Apalagi, Partai Hanura (Hanura) mewakili 5,26% dari total suara. Suara lain tidak hadir di DPR karena ambang batas parlemen 3,5%. (Prabowo, 2014)

Tabel 4.4 Data Rekapitulasi Hasil Pemilu 2014

Partai	Peringkat pada Pemilu 2014	Ideologi	Aplikasi konsep
PDI-P	18,95%	Nasionalist-Socialist	Pro-Elite/Isolasionist
Golkar	14,75%	Nationalist-Liberalist	Pluralist/Internasionalist
Gerindra	11,81%	Nasionalist-Socialist	Pro-Elite/Isolasionist
Demokrat	10,19%	Nasionalist-Liberalist	Pluralist/Internasionalist
PKB	9,04%	Islamist-Liberalist	Pluralist/Internasionalist
PAN	7,59%	Islamist-Liberalist	Pluralist/Internasionalist
PKS	6,79%	Islamist-Conservative	Pro-Elite/Isolasionist
NasDem	6,72%	Nasionalist-Socialist	Pro-Elite/Isolasionist
PPP	6,53	Islamist-Conservative	Pro-Elite/Isolasionist
Hanura	5,26%	Nasionalist-Socialist	Pro-Elite/Isolasionist
Tidak masuk kualifikasi	2,37%	No Data	No Data

Data diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia yang dimuat di Kompas 9 Mei 2014² (Prabowo, 2014)

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sedang berayun menjadi Isolasionis pada Pemilu 2014. Indikasinya adalah Partai PDI-P peringkat 1 di parlemen yang mewakili 18,95%, jumlah pemilih. Sementara juga terpilih presiden baru Joko Widodo juga dari partai yang sama terpilih sebagai Presiden ketujuh Indonesia, dan pendekatan kebijakannya Pro-Elite. Jika digabung dengan partai lain yang juga mewakili pemilih Isolasionis persentasenya meningkat menjadi 56,06%. Sementara itu, meski partai yang mewakili pemilih Internasionalis menempati urutan ke-2 (Golkar dengan 14,75%), jumlah 41,57% masih jauh tertinggal dari afiliasi partai Isolasionis. Sebanyak 2,58% suara lainnya tidak hadir di DPR karena ambang batas parlemen 3,5%. Meski jarak antara Isolasionis dan Internasionalis sempit, namun pertumbuhan opini publik yang mendukung pendekatan Isolasionis dalam pemerintahan tumbuh signifikan dibandingkan dengan Pemilu 2009 sebesar 41,40%. Rentetan skandal korupsi di kabinet pemerintahan sebelumnya, memang memengaruhi opini publik.

² <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>

Akibatnya, masyarakat dijamin hukuman dengan tidak memilih partai yang berafiliasi dengan pemerintahan sebelumnya. Untuk menyimpulkan bagian ini, ada hubungan yang signifikan antara masyarakat dan opini publik. Di negara demokrasi seperti Indonesia, pemerintah adalah amanah masyarakat, dan suara rakyat atau masyarakat pada umumnya diwakili melalui parlemen. Masyarakat dapat menghukum pemerintah petahana jika mereka tidak puas dengan kinerjanya, hanya dengan tidak memilih partai yang berafiliasi dengan pemerintah untuk pemilihan lanjutan.

Politik dalam negeri Isolasionis dan kebijakan Jokowi Nawacita

Berdasarkan data pada bagian sebelumnya mengenai hasil Pemilu 2014. Terlihat bahwa mayoritas masyarakat cenderung cenderung mengucilkan diri. Selanjutnya, proporsi parlemen juga didominasi oleh calon dari partai yang ideologinya cenderung isolasionis. Selain itu, prioritas kebijakan Nawacita Jokowi adalah percepatan perekonomian nasional dengan membangun infrastruktur, reformasi sistem birokrasi, dan meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia dengan pendidikan.

**Tabel 4.5. Visi Misi Jokowi pada Pilpres 2014
(9 Agenda Prioritas Nawacita)**

No	Priority	Isolationist/Internationalist
1	Bringing back the country to protect the entire nation and provide a sense of security to all citizens	Isolationist
2	Make Government always present by building a clean, effective, democratic, and reliable governance	Isolationist
3	Build Indonesia from the periphery by strengthening the regions and villages within the framework of the unitary state	Isolationist
4	Strengthen the country's presence in reforming the system and law enforcement that is free of corruption, dignity, and trust	Isolationist
5	Improve the rank of human life of Indonesia	Isolationist
6	Increasing people's productivity and competitiveness in the international market so that the nation of Indonesia can advance and rise with other Asian nations	Internationalist
7	Achieve economic independence by moving the strategic sectors of the domestic economy	Isolationist
8	Revolutionize the character of the nation	Isolationist
9	Strengthen diversity and strengthen Indonesian social restoration	Isolationist

Data dari laman resmi Presiden RI

Dari tabel di atas dapat dipastikan bahwa pemerintahan Jokowi cenderung Isolasionis, hanya satu agenda prioritas yang dikategorikan sebagai Internasionalis. Selain itu, delapan agenda prioritas lainnya adalah fokus pada pembangunan nasional yang merupakan tanda perilaku isolasionis. Selain itu juga didukung oleh hasil pemilihan parlemen yang juga Isolasionis (Lihat tabel 2.2 pada Bab II).

Maka antara eksekutif (presiden), dan legislatif (DPR), semuanya saling mendukung menjadikan pemerintahan Isolasionis. Parlemen tidak menggunakan hak interpelasi merupakan tanda bahwa mereka mendukung kebijakan administratif. Dalam kasus Proyek Rel Berkecepatan Tinggi, pemerintah eksekutif mengeluarkan kebijakan untuk menominasikan China sebagai mitra proyek, dan serangkaian keputusan presiden yang berurutan mengenai aturan dan regulasi proyek. Namun, legislatif bertindak cukup, dan cenderung mendukungnya.

Jalan menuju Pemilu Presiden dan Pemilu 2019 Jokowi dan Legislatif

Pasca kemenangan Pilpres 2014, Jokowi memasuki masa pemerintahan pertama. Sejak Indonesia mengadopsi demokrasi ke dalam sistem pemerintahan, presiden yang sedang menjabat dapat mengajukan permohonan untuk pemilihan presiden berikutnya untuk satu periode lagi. Alhasil, faktor-faktor tersebut menarik minat Jokowi untuk pemilihan presiden mendatang, juga kepentingan legislatif di kalangan anggota parlemen (dari partai koalisi) dengan cara yang sama.

Proyek Rel Berkecepatan Tinggi memang merupakan proyek "mercusuar" yang dibuat oleh Jokowi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk pemilu 2019 setelah masa jabatan presiden pertamanya. Realitas mayoritas anggota parlemen adalah dari PDI-P dimana partai yang mencalonkan Jokowi sebagai presiden turut berperan dalam kasus ini. Tetap seluruhnya merupakan tanda dukungan parlemen terhadap kebijakan eksekutif. Terlepas dari perilaku liberal Partai Golkar yang menduduki peringkat ke-2 pada Pilpres 2014, Wakil Presiden Jusuf Kalla dicalonkan oleh Partai Golkar. Maka tak heran jika mayoritas parlemen mendukungnya. Anggota kabinet itu juga berperan lain terkait perilaku anggota parlemen yang sebagian besar partai yang memiliki perwakilan di parlemen tersebut terlibat dalam kabinet presiden Jokowi.

Tabel 4.6. Komposisi Kabinet Jokowi 2014

No	Nama	Kementerian	Afiliasi
1	Pratikno	Minister of State Secretary	Technocrats
2	Adrianof Chaniago	Minister of Planning and Development	Technocrats
3	Indroyo Soesilo	Coordinating Minister for Maritime Affairs	Technocrats
4	Ignatius Jonan	Minister of Transportation	Technocrats
5	Susi Pudjiastuti	Minister of Marine Affairs and Fisheries	Technocrats
6	Arief Yahya	Minister of Tourism	Technocrats
7	Sudirman Said	Minister of Energy and Mineral Resources	Technocrats
8	Tedjo Edy Purdjianto	Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs	Military
9	Tjahjo Kumolo	Minister of Home Affairs	PDI-P
10	Retno Marsudi	Minister of Foreign Affairs	Technocrats
11	Ryamizad Ryacudu	Minister of Defense	Military
12	Yasoona H Laoly	Minister of Law and Human Rights	PDI-P
13	Rudiantara	Minister of Communications and Informatics	Technocrats
14	Yuddy Chrisnandi	Minister of Administrative Reform	Hanura
15	Sofjan Djalil	Coordinating Minister for Economic Affairs	Technocrats
16	Bambang Brodjonegoro	Minister of Finance	Technocrats
17	Rini M Soemarno	Minister of State-Owned Enterprises	Technocrats
18	Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	Minister of Cooperatives and SMEs	PDI-P
19	Saleh Husin	Minister of Industry	Hanura
20	Rachmat Gobel	Minister of Trade	Technocrats
21	Amran Sulaiman	Minister of Agriculture	Technocrats
22	Hanif Dhakiri	Minister of Manpower	PKB
23	Basuki Hadimuljono	Minister of Public Works and People's Housing	Technocrats
24	Siti Nurbaya	Minister of Environment and Forestry	NasDem
25	Ferry Musyidan Baldan	Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning	NasDem
26	Puan Maharani	Coordinating Minister for Human Development and Culture	PDI-P
27	Lukman Hakim Saifudin	Minister of Religious Affairs	PPP
28	Nila F Moeloek	Minister of Health	Technocrats
29	Khofifah Indar Parawansa	Minister of Social Affairs	PKB
30	Yohana Yambise	Minister of Women Empowerment and Child Protection	Technocrats
31	Anies Baswedan	Minister of Education	Technocrats
32	M. Nasir	Minister of Research, Technology and Higher Education	Technocrats
33	Imam Nahrawi	Minister of Youth and Sports	PKB
34	Marwan Jafar	Minister of Villages, Disadvantaged Areas Development, and Transmigration	PKB

Data diterbitkan Kompas 26 Oktober 2014 (Asril, Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK, 2014)

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar anggota kabinet berlatar belakang teknokrat, namun beberapa partai yang berkoalisi di parlemen juga memiliki kursi di kabinet presiden yaitu: PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura. Bersama PDI-P dan Golkar, koalisi ini mendapat porsi mayoritas di parlemen atau 61,22%.

Affiliasi Media dengan Kelompok Elite

Berdasarkan survei Nilsen yang dipublikasikan Mei 2014, sebagian besar masyarakat di Indonesia masih memilih Televisi sebagai media untuk mendapatkan informasi. Setidaknya lebih dari 95% orang Indonesia menggunakannya. Karena itu, televisi merupakan sumber alami untuk menyebarkan informasi kepada publik. Sementara itu, kredibilitas saluran televisi independen dalam hal ini saluran berita 24 jam diragukan. Dilihat dari survei Nilsen, media televisi Berita 24 Jam utama masih dimiliki oleh kalangan elit. Yaitu Hary Tanoesoedibjo (MNC Group, Inews TV), Surya Paloh (Media Indonesia Group, Metro TV), Aburizal Bakrie (Bakrie Group, Di Bawah Anak Perusahaan Viva Group, TVOne), Chairul Tanjung (CT Group, CNN Indonesia). Semua channel tersebut free to air artinya tayangannya gratis, kecuali CNN Indonesia dari CT Group yang perlu berlangganan kabel untuk menontonnya, dan CCN Indonesia baru tayang pada tanggal 15 Desember 2015. Alhasil, share viewer mereka relatif rendah dibandingkan kompetitor lainnya.

Tabel 4.7. Korelasi antara Media Elite dan Parpol

Nama	Affiliasi	Party Status in Government	Pro-Government or Opposition
Surya Paloh	NasDem-Chairman	Coalition Party	Pro-Government
Hary Tanoesoedibjo	Perindo-Chairman	New Party establish 2015	None
Aburizal Bakrie	Golkar-Chairman of the Board of Trustees	Coalition Party, Government Party	Pro-Government
Chairul Tanjung	Former Coordinating Minister for Economics SBY Cabinet (Democrat Party)	Opposition Party	Opposition

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar elite yang memiliki media penting di Indonesia berafiliasi dengan partai koalisi di pemerintahan. Aburizal Bakrie yang berafiliasi dengan Partai Golkar sebagai ketua dewan pengawas luas. Dalam pemilihan presiden 2014 Golkar juga merupakan partai yang mencalonkan

Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Elit Surya Paloh lainnya dan memiliki afiliasi dengan partai Pro-Pemerintah. Kendati Chairul Tanjung adalah mantan Menteri Koordinator Perekonomian di kabinet SBY yang berafiliasi dengan Partai Demokrat, ia tidak langsung terikat dengan partai baik sebagai kader maupun jabatan penting. Bersamaan dengan itu, CNN Indonesia belum banyak mendapatkan viewer di Indonesia dan berdiri pada akhir tahun 2015. Namun untuk CNN Indonesia ini juga memiliki portal berita yang dapat diakses semua orang secara gratis, sedangkan pembaca juga cukup sedikit dalam share jumlah penonton. bandingkan dengan media tv. Selain itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap opini publik di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas elit media memiliki kepentingan yang sejalan dengan agenda pemerintah. Dalam skenario yang sama juga Hary Tanoesoedibjo, meskipun tampak tidak ada kepentingan baik yang pro maupun yang menentang pemerintah, namun ia membentuk partai politiknya pada awal tahun 2015, yang tentu saja ia juga memiliki kepentingan politiknya sendiri.

Tabel 4.8. Pencitraan media dalam berita berkaitan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Media	Kata Kunci di Youtube	Presentation of News: Agenda Setting, Framing, Priming (+/-/N ³)
Metro TV	Kereta Cepat ⁴ Jakarta- Bandung Metro TV	Faming (+)
TV One	Kereta Cepat Jakarta-Bandung TV One	Framing (+)
Inews	Kereta Cepat Jakarta-Bandung Inews	Framing (-)
CNN Indonesia	Kereta Depat Jakarta-Bandung CNN Indonesia	Framing (N)

dihasilkan oleh sampel dari youtube dengan kata kunci dengan masing-masing sampel media minimal tiga video(Lihat Daftar Lampiran)

Dari data di tabel tersebut, tidak ada satu pun media yang dimiliki oleh pemerintah. Akibatnya, tidak ada satupun yang ditampilkan dalam cara pengaturan Agenda. Selain itu, bukan merupakan isu esensial yang diminati media untuk memprioritaskannya. Dua media yang berafiliasi langsung dengan pemerintah meringkai positif siaran berita proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sedangkan

³ Neutral

⁴ Kereta Cepat is Indonesian translation for High-Speed Train

dua media lainnya yang tidak berafiliasi dengan pemerintah baik membingkai siaran secara netral maupun negatif.

Pemilik CNN Indonesia, Chairul Tanjung, tampaknya tidak memiliki kepentingan khusus dengan masalah ini. Apalagi CNN Indonesia adalah bisnis yang harus dibayar pemirsanya untuk mendapatkan berita darinya. Jadi, wajar saja jika CNN Indonesia bersikap independen dan netral, meskipun penontonnya terbatas, dan sama sekali tidak mempengaruhi opini publik.

Di sisi lain, Hary Tanoesoedibjo telah membentuk partai politik baru. Walaupun partainya tidak berada di dalam pemerintahan, hal itu membuatnya memiliki kepentingan politik, dalam hal ini adalah Pemilu 2019. Tidak mudah (praktis hampir mustahil) baginya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden karena berlatar belakang non-muslim dan beretnis Tionghoa. . Konsekuensinya, opsi jalannya yang mungkin adalah mendapatkan pemilih dalam jumlah besar sebanyak mungkin. Untuk masuk daftar parlemen. Menjadi kritis terhadap pemerintah adalah salah satu cara untuk mencapai kepentingannya.

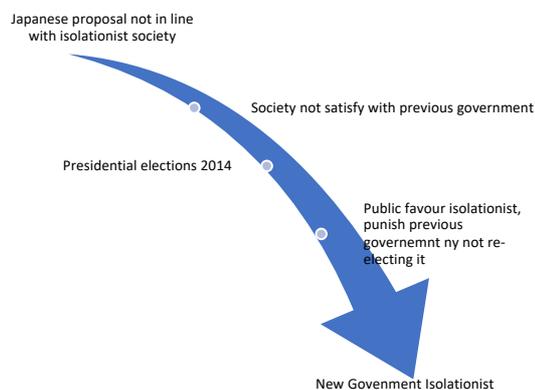
BAB V

Kesimpulan

Analisis politik luar negeri dapat dilakukan dalam tiga level, internasional, nasional, dan individual. Dalam penelitian ini, analisis politik dalam negeri tingkat nasional, dimungkinkan. Skripsi ini menggunakan pendekatan opini publik, dengan model pluralis dan model elit sebagai alat analisisnya. Untuk lebih memahami variabel isolasionis dan internasionalis juga digunakan dalam penelitian ini, bersama dengan konsep agenda setting, priming, dan framing untuk memahami bagaimana media mempengaruhi opini publik.

Indonesia sebagai negara telah mengalami transisi dari rezim otoriter di era orde baru ke era demokrasi menyusul jatuhnya rezim Suharto. Demokrasi telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia selama hampir dua dekade. Apalagi dibuktikan dengan pemilihan langsung baik eksekutif maupun legislatif. Meskipun Indonesia adalah negara demokrasi, namun belum tentu politik dalam negeri 100% bebas dari kepentingan, ada juga elit yang berkepentingan dengan politik dalam negeri di Indonesia.

Gambar 5.1. Perubahan Ideologi Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri

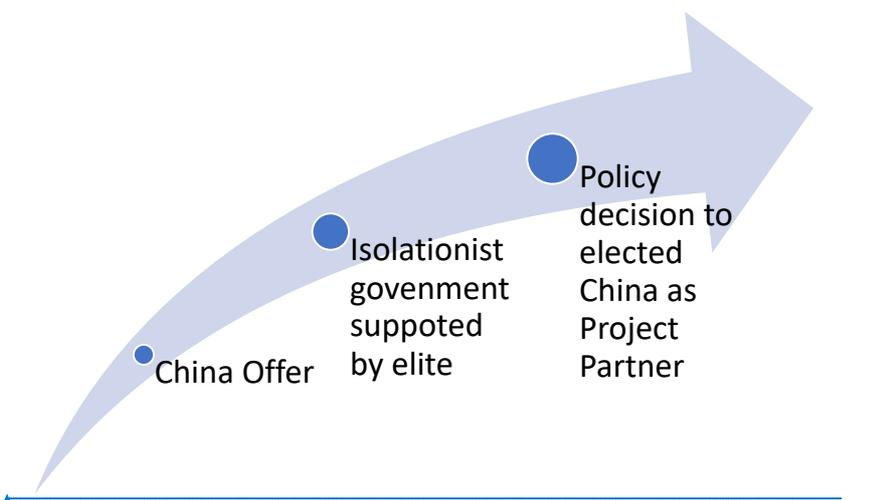


Dalam hal ini pemerintah dipilih secara langsung oleh mayoritas orang yang mendukung isolasionis. Isolasionis dalam konteks ini berarti pembangunan ekonomi

Formatted: Font: Book Antiqua

domestik dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Jepang sudah menawarkan dan memprakarsai proyek tersebut dengan melakukan studi kelayakan terkait Proyek Kereta Api Tinggi pada periode kepresidenan sebelumnya. Namun usulan Jepang akan menekankan pada kondisi ekonomi yang sebagian besar masyarakat lebih menyukai isolasionis. Selain itu rentetan skandal korupsi yang dilibatkan oleh partai demokrat menjadi alasan signifikan mengapa publik harus “menghukum” partai tersebut di pemilu nasional 2014.

Gambar 5.2. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Diikuti Oleh Ideologi yang Isolasionis



Formatted: Font: Book Antiqua

Sementara itu, setelah pemerintahan baru terpilih, China menawarkan proposal untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Apalagi, usulan China ini sejalan dengan kebijakan isolasionis pemerintah yang baru. Ini juga didukung oleh elit yang juga berkepentingan dengan pemerintahan. Jadi proses pembuatan kebijakan mencapai tujuannya dengan mendirikan proyek, dan China telah memilih sebagai mitra proyek.

Untuk menyimpulkan hasil dari penelitian ini ditemukan bukti bahwa opini publik berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan luar negeri, maka masyarakat isolasionis menginginkan perkembangan ekonomi nasional. Terkait kasus proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, masyarakat menghukum pemerintah sebelumnya

dengan tidak memilih kembali. Akibatnya, pembentukan dan keputusan isolasionis baru telah dibuat. Media dimiliki oleh elit yang memiliki kepentingan, yang mayoritas sejalan dengan agenda isolasionis baru. Media bertindak berdasarkan kepentingan elit, dan bekerja dengan membingkai siaran berita baik secara negatif, positif, maupun netral.

Proyek rel kecepatan tinggi Jakarta Bandung hanyalah satu "inci" dari skenario besar China untuk membangun jaringan kereta cepat, secara masif di seluruh dunia. China berambisi menghubungkan daratan Inggris dengan China antara Beijing-London, melalui jaringan transportasi kereta cepat antar benua, untuk kepentingan ekonominya termasuk untuk memperoleh sumber daya alam. Di Indonesia, China juga tengah mengincar pembangunan proyek kereta cepat menuju Surabaya. Sedangkan di Asia, China juga mengincar proyek serupa di Malaysia-Singapura, Myanmar, Vietnam, dan India.

Daftar Pustaka

1. Gindarsah, I. (2012). Democracy and Foreign Policy-Making in Indonesia: A Case Study of the Iranian Nuclear Issue, 2007-08. *Contemporary Southeast Asia*, 416-437.
2. Robinson, P. (2012). The role of media and public opinion. In S. Smith, A. Hadfield, & T. Dunne, *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases* (p. 169). Oxford: Oxford University Press.
3. Supriadi, A., & Armenia, R. (2014, November 8). *Jokowi Lakukan Lawatan Perdana ke 3 Negara*. Retrieved November 22, 2017, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141108085906-20-10384/jokowi-lakukan-lawatan-perdana-ke-3-negara/>
4. Putra, B. S. (2017, January 19). *5 Mega Proyek Investasi China di Indonesia*. Retrieved January 10, 2018, from <https://www.rappler.com/indonesia/ekonomi/158819-5-mega-proyek-investasi-china-indonesia>
5. Wu, C. (2011). Forging Closer Sino-Indonesia Economic. *RITSUMEIKAN INTERNATIONAL AFFAIRS Vol.10*, 119-142.
6. Alexander, C. C., & Lucky, A. L. (2011). *Indonesia – China Trade Relations: The deepening of economic integration amid uncertainty?* Jakarta: Trade Knowledge Network.
7. Misra, R., & Sari, I. P. (2010). Indonesia-China relations: Challenges and Opportunity. *ISDA ISSUE BRIEF*, 2-7.
8. Maddaremmeng, A. P. (2015). ASEAN-China Economic Relations: A View from Indonesia. *Working Paper in Economics and Business Volume V No.2/2015*, 1-12.
9. Johanes, H. (2017). *How the Indonesian Elite Regards Relations with China*. Singapore: Yusof Ishak Institute.
10. Hafid, A. P. (2016). Presepsi Suharto dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Cina pada Awal Orde Baru. *Indonesian Perspective*, 23-42.

11. Alan, B. (2004). *Social Research Method*. Oxford: Oxford University Press.
12. Guerin, B. (2005, August 17). *Bilaterals*. Retrieved February 18, 2018, from <https://www.bilaterals.org/?indonesia-china-find-love>
13. Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Berkeley: University of California Berkeley.
14. Fearon, J. D. (1998). *Domestic Politics, Foreign Policy, and Theory of International Relations*. Chicago: University of Chicago.
15. Budiarjo, M. (2010). Partai Politik. In M. Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (pp. 397-454). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
16. Indonesia, P. R. (2008). The Law of Republic of Indonesia No.10 2008 regarding National Elections. *People's Representative Council Republic of Indonesia* (p. 2). Jakarta: People's Representative Council Republic of Indonesia .
17. Indonesia, P. R. (2012). UU no.8 Tahun 2012. *People's Representative Council Republic of Indonesia* (p. 103). Jakarta: People's Representative Council Republic of Indonesia .
18. Lubis, M. (2017, August 14). *Tren baru di kalangan pengguna internet di Indonesia*. Retrieved January 27, 2018, from <http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/TREN-BARU-DI-KALANGAN-PENGGUNA-INTERNET-DI-INDONESIA.html>
19. Jamaludin, F. (2018, February 19). *APJII sebut pengguna internet Indonesia tahun 2017 capai 143,26 juta jiwa*. Retrieved February 21, 2018, from <https://www.merdeka.com/teknologi/apji-sebut-pengguna-internet-indonesia-tahun-2017-capai-14326-juta-jiwa.html>
20. Bohang, K. (2018, February 22). *Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia?* Retrieved 2 24, 2018, from <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia>.

- 21.Suryanto. (2014, November 12). *Tiongkok bersaing dalam proyek kereta super cepat Jakarta-Surabaya*. Retrieved January 10, 2018, from <https://www.antaraneews.com/berita/463948/tiongkok-bersaing-dalam-proyek-kereta-super-cepat-jakarta-surabaya>
- 22.RI, D. (n.d.). *Tentang DPR*. Retrieved 1 10, 2018, from <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>
- 23.Asril, S. (2014, November 26). *Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK*. Retrieved February 2018, 22, from <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/26/17505831/Inilah.Susunan.Kabinet.Kerja.Jokowi-JK>
- 24.Nilsen Indonesia. (2014, May 22). *Nilsen*. Retrieved January 2, 2018, from <http://www.nilsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-konsumsi-media-lebih-tinggi-di-luar-jawa.html>
- 25.Prabowo, D. (2014, Mei 9). *Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014*. Retrieved January 4, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>
- 26.Dian Maharani, D. R. (2014, 22 July). *Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014*. Retrieved January 8, 2014, from <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014>
- 27.Kompas.com. (2009, May 9). *Inilah Hasil Akhir Perolehan Suara Nasional Pemilu*. Retrieved January 22, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2009/05/09/22401496/inilah.hasil.akhir.perolehan.suara.nasional.pemilu>
- 28.Rastika, I. (2013, February 17). *Ini Alasan Hary Tanoë Bergabung dengan Hanura*. Retrieved January 22, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2013/02/17/1640276/Ini.Alasan.Hary.Tanoë.Bergabung.dengan.Hanura>

29. Arsil, S. (2013, January 26). *Surya Paloh: Nasdem Siap Kompetisi dalam Harmoni*. Retrieved January 22, 2018, from <https://entertainment.kompas.com/read/2013/01/26/22444328/surya.paloh.nasdem.siap.kompetisi.dalam.harmoni>
30. Akuntono, I. (2014, December 4). *Hari Ini, Aburizal Bakrie Dilantik sebagai Ketua Golkar 2014-2019*. Retrieved January 22, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/04/07544291/Hari.Ini.Aburizal.Bakrie.Dilantik.sebagai.Ketua.Golkar.2014-2019>
31. Arsil, S. (2014, May 16). *Presiden SBY Tunjuk Chairul Tanjung Jadi Menko Perekonomian*. Retrieved January 22, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/16/1525179/Presiden.SBY.Tunjuk.Chairul.Tanjung.Jadi.Menko.Perekonomian>
32. Suryowati, E. (2014, August 6). *Paling Cepat, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibangun Tahun 2017*. Retrieved January 22, 2018, from <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/06/114904126/Paling.Cepat.Kereta.Cepat.Jakarta-Bandung.Dibangun.Tahun.2017>
33. Booth, A. (2011). *China's Economic Relations with Indonesia: Threat and Opportunity*. London: SOAS University of London.
34. T.R, M. R. (2016). Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (GOLKAR) di tingkat lokal: Fenomena Politik klan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 160-182.
35. Bryman, A. (2004). *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.
36. Hertanto. (2009, October 21). *Inilah Calon Menteri/Pejabat Tinggi Versi SBY-Boediono*. Retrieved April 17, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2009/10/21/08243630/inilah.calon.menteripejabat.tinggi.versi.sby-boediono>